

LAPORAN PENELITIAN PENELITIAN

**KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH
UNTUK
BIDANG SOSIAL BUDAYA/EKONOMI DAN LINGKUNGAN/WILAYAH FISIK
DAN PRASARANA**



KAJIAN PENGELOLAAN DAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA KOTA MAKASSAR UNTUK PERBAIKAN TATA KOTA DAN PENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT

Ketua Tim	: Dr. Andi Nur Bau Massepe
Peneliti Pendamping	: Dr. Suhasman, S.Hut., M.Si Siti Mushlihah, ST., MT. Lasmana, S.IP, M.H.

**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
TAHUN 2018**

LEMBAR PENGESAHAN

KETUA TIM : Dr. Andi Nur Bau Massepe
Peneliti Pendamping : Dr. Suhasman, S.Hut., M.Si.
Siti Mushlihah, ST., MT.
Lasmana, S.IP, M.H.
WAKTU PENELITIAN : Mei 2018 s.d November 2018
JUDUL PENELITIAN : Kajian Pengelolaan Dan Penataan Pedagang Kaki Lima
Kota Makassar Untuk Perbaikan Tata Kota Dan
Peningkatkan Ekonomi Masyarakat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian ini telah selesai dilaksanakan dan hasilnya telah diseminarkan dan diseminasikan. Dokumen hasil penelitian ini diserahkan kepada Pemerintah Kota Makassar melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar.

Makassar, 24 Oktober 2018

Telah diperiksa oleh,
Kepala Bidang Litbang
Pembangunan Daerah

Peneliti Utama,

H. Aminuddin, MM, Ph.D
NIP. 196612311989021029

Dr. Andi Nur Bau Massepe
NIP. 197804282009121001

Disetujui dan Disahkan oleh
Kepala BPPD Kota Makassar

Dr. Aryati Puspasari Abady, S.Pi., M.Si.
NIP. 197306171998032007

ABSTRAK

Sektor informal Pedagang Kaki Lima (PK5) mempunyai peranan yang sangat besar untuk meningkatkan perekonomian terutama masyarakat ekonomi lemah dan sektor ini juga menyerap tenaga kerja yang mempunyai keahlian yang relatif minim. Peningkatan jumlah pedagang kaki lima yang berjualan dipinggir jalan dibandingkan sejak beberapa puluh tahun yang lalu terus bertambah setiap tahunnya. Namun setidaknya terdapat beberapa isu penting yang terkait dengan PK5 di perkotaan, antara lain: adanya dominasi sektor formal atas sektor informal termasuk PK5 di perkotaan sehingga menimbulkan konflik sosial yang memerlukan penanganan yang lebih berkelanjutan, marjinalisasi ekonomi sektor informal termasuk PK5 yang menimbulkan berbagai permasalahan seperti ketidaktertiban, limbah, tidak adanya perlindungan jiwa, eksploitasi anak, persaingan tidak sehat, ketiadaan perlindungan hukum, dan sulitnya pemberdayaan karena mobilitas. Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mengkaji pengelolaan dan penataan PK5 kota Makassar. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah : mengkaji distribusi, dan kondisi sosial ekonomi PK5 saat ini, mengkaji upaya tata kota Makassar agar menjadi kota yang lebih tertib dan indah, mengkaji upaya yang dapat dilakukan agar keberadaan PK5 tetap dapat dipertahankan sehingga tidak menghilangkan mata pencaharian masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka akan dilakukan tahapan kegiatan sebagai berikut: pengumpulan studi literatur dan regulasi, serta sistem yang diterapkan Pemkot Makassar, survey lapangan, *Focus Group Discussion* (FGD) dari berbagai stakeholders. Data yang diperoleh pada penelitian ini kemudian dianalisis dengan menggunakan 2 metode, yaitu analisis statistik deskriptif dan analisis SWOT. Secara garis besar pola penyebaran PK5 Kota Makassar ada dua jenis, yaitu: pola penyebaran PK5 memanjang (linier agglomeration) dan pola penyebaran PK5 secara mengelompok (*focus agglomeration*). Pola penyebaran PK5 memanjang, antara lain terdapat di jalan Perintis, jalan Hertasning, dan jalan Antang Raya, jalan Perumnas Antang Raya dan BTP. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan tata kota Makassar agar menjadi kota yang lebih tertib dan indah terkait adanya PK5, antara lain: Penataan lokasi PK5 melalui pembentukan pasar sentra PK5 dan Pengendalian dan pengawasan PK5 secara berkesinambungan dan terpadu. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah kota untuk mempertahankan keberadaan PK5 Kota Makassar agar tidak menghilangkan mata pencaharian masyarakat, antara lain dengan membuat data base dan road map pengembangan pelaku PK5 sehingga memiliki tahapan pengembangan dan pada level ekonomi tertentu mereka dapat keluar dari kelompok PK5 (dari sektor informal menjadi sektor formal).

Kata kunci: Pedagang Kaki Lima; Makassar; Tata Kota, Ekonomi masyarakat

RINGKASAN EKSEKUTIF

Persoalan PK5 (Pedagang Kaki Lima) merupakan isu perkotaan yang sering muncul di berbagai media massa khususnya di kota Makassar. Setidaknya terdapat beberapa isu yang penting yang terkait dengan PK5 di perkotaan, yaitu adanya dominasi sektor formal atas sektor informal termasuk PK5 di perkotaan sehingga menimbulkan konflik sosial yang memerlukan penanganan yang lebih berkelanjutan. Disisi lain, sektor informal PK5 mempunyai peranan yang sangat besar untuk meningkatkan perekonomian terutama masyarakat ekonomi lemah dan sektor ini juga menyerap tenaga kerja yang mempunyai keahlian yang relatif minim.

Peningkatan jumlah pedagang kaki lima yang berjualan dipinggir jalan dibandingkan sejak beberapa puluh tahun yang lalu terus bertambah setiap tahunnya. Namun setidaknya terdapat beberapa isu penting yang terkait dengan PK5 di perkotaan, antara lain: adanya dominasi sektor formal atas sektor informal termasuk PK5 di perkotaan sehingga menimbulkan konflik sosial yang memerlukan penanganan yang lebih berkelanjutan, marjinalisasi ekonomi sektor informal termasuk PK5 yang menimbulkan berbagai permasalahan seperti ketidaktertiban, limbah, tidak adanya perlindungan jiwa, eksploitasi anak, persaingan tidak sehat, ketiadaan perlindungan hukum, dan sulitnya pemberdayaan karena mobilitas.

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengkaji pengelolaan dan penataan PK5 kota Makassar. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah : mengkaji distribusi, dan kondisi sosial ekonomi PK5 saat ini, mengkaji upaya tata kota Makassar agar menjadi kota yang lebih tertib dan indah, mengkaji upaya yang dapat dilakukan agar keberadaan PK5 tetap dapat dipertahankan sehingga tidak menghilangkan mata pencaharian masyarakat.

Tahapan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut: pengumpulan studi literatur dan regulasi, serta sistem yang diterapkan Pemkot Makassar, survey lapangan, *Focus Group Discussion* (FGD) dari berbagai stakeholders. Data yang diperoleh pada penelitian ini kemudian dianalisis dengan menggunakan 2 metode, yaitu analisis statistik deskriptif dan analisis SWOT. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi jawaban responden terhadap variabel atau indikator dalam bentuk nilai rata-rata dan prosentase. Analisis SWOT digunakan sebagai dasar dalam merumuskan

strategi dan kebijakan untuk menentukan aturan tentang tempat usaha bagi pedagang kaki lima dan penentuan pengembangan tata kota kota Makassar.

Secara garis besar pola penyebaran PK5 Kota Makassar ada dua jenis, yaitu: pola penyebaran PK5 memanjang (*linier agglomeration*) dan pola penyebaran PK5 secara mengelompok (*focus agglomeration*). Pola penyebaran PK5 memanjang (*linier agglomeration*) umumnya terjadi di sepanjang atau dipinggir jalan utama (*main street*) atau pada jalan yang menghubungkan jalan utama. Di Kota Makassar, pola penyebaran PK5 memanjang terdapat pada kawasan pusat pendidikan, sekitar pusat-pusat perbelanjaan, atau di sekitar pemukiman padat penduduk. Adapun persebaran PK5 yang berada di sekitar kawasan pendidikan, antara lain berada di jalan Perintis dan jalan Hertasning, dan jalan antang raya. Sedangkan PK5 yang berada pada kawasan perumahan, antara lain di jalan Perumnas Antang raya dan BTP. Pola penyebaran secara memanjang atau linier *agglomeration* tersebut dicirikan oleh aktivitas PK5 tersebut berjualan disepanjang jalan dengan mengikuti pola jaringan jalan dan lokasi aktivitas PK5 terhubung dengan jalan utama yang selalu ramai dilalui oleh pengguna jalan raya. Pola penyebaran PK5 yang mengikuti pola jaringan jalan ini menyebabkan penurunan terhadap keindahan kota, selain itu, tidak jarang kendaraan konsumen diparkir di badan Jalan, sehingga berakibat pada terganggunya lalu lintas.

Pola penyebaran mengelompok atau *focus agglomeration* biasanya terjadi pada kawasan aktivitas formal seperti pada kawasan pasar atau pusat perbelanjaan, yang selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat serta itu taman dan lapangan. Pola Penyebaran mengelompok ini jika dikaitkan dengan aktivitas PK5 di Kota Makassar terjadi pada kawasan pusat rekreasi/Taman kota/lapangan dan pusat perbelanjaan dengan titik-titik penyebaran lokasi PK5 diantaranya sebagai berikut: Jalan RA. Kartini, Depan pantai losari, Jalan Nikel, Jalan Hertasning dan Jalan dekat waduk antang (Tamangapa)

Berdasarkan berita yang dimuat di harian Fajar, tahun 2016. Pemkot Makassar mulai menata Pedagang Kaki Lima dengan membuat titik- titik lokasi yang akan menjadi PK5 Centre, antara lain: Jl Boulevard, Nikel Raya, Tamangapa Raya, Metro Tanjung Bunga, depan Rusunawa Mariso, RA Kartini dan Hertasning. PK5 tidak diperbolehkan lagi menggelar dagangannya di trotoar dan di bahu jalan. Namun, hingga saat ini kawasan PK5 centre yang telah direncanakan sebelumnya baru berdiri di Jl. RA. Kartini.

Komoditas barang yang diperdagangkan oleh pedagang kaki lima di kota makassar terbagi kedalam Bahan mentah atau setengah jadi, makanan siap konsumsi, non makanan,

dan Jasa. Kelompok Bahan mentah dan setengah jadi (*unprocessed and semiprocessed foods*) pedagang yang menjual barang seperti daging, buah, sayuran, beras, dan sebagainya. Makanan siap konsumsi (*prepared foods*), terdiri dari bahan-bahan yang dapat langsung dikonsumsi saat itu juga, biasanya berupa makanan dan minuman seperti kue-kue, nasi kuning, aneka cemilan, minuman dingin, aneka es dan juice. Non makanan (*nonfood items*), jenis barang dagangan ini cakupannya lebih luas dan biasanya tidak berupa makanan, misalnya baju kaos dan celana, tekstil, asesoris handphone, obat-obatan, pulsa dan paket internet serta lain-lain. Jasa (*services*), yang termasuk dalam kategori jasa pelayanan, seperti tukang semir sepatu, potong rambut, service jam tangan dan sebagainya.

Secara umum pola pelayanan para PK5 di kota Makassar ini terbagi dua yaitu berpindah dan tetap. Pola Berpindah biasanya mereka berjualan di tepi jalan-jalan yang ramai. Selain itu juga mereka dapat ditemui di depan ruko atau toko yang biasanya mereka sewa oleh pemilik toko tersebut. Pola menetap biasanya bagi PK5 yang memiliki rumah di jalan-jalan ramai dan strategis memanfaatkan jalan depan rumah mereka untuk berjualan. Selain itu ada juga PK5 yang membuat rumah semi permanen terbuat dari kayu untuk berjualan, dan biasanya juga mereka tinggal disana.

Waktu operasional para Pedagang Kaki Lima dibagi ke dalam tiga kelompok yaitu kurang dari 3 jam, 4-8 jam dan lebih dari 8 jam. Untuk kelompok Pedagang Kaki Lima yang berjualan kurang dari 3 jam biasanya mudah ditemui di kawasan Car Free Day (CFD) yang berada di lokasi Jalan Boulevard untuk Kecamatan Panakukang, dan Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Ujung Pandang, dan jalan Losari Kecamatan Ujung Pandang. Pedagang kaki lima yang beroperasi 4-8 jam dapat ditemukan juga di pinggiran jalan strategi kota Makassar mereka biasanya memiliki pola pelayanan berpindah dengan menggelar meja atau gerobak, gelaran/ tikar, dan mobil/kendaraan. Mulai biasanya pagi hari sampai siang hari dengan berjualan Makanan Siap Konsumsi khususnya untuk makanan sarapan seperti nasi kuning, bubur ayam, nasi campur, bakso bakar, dan sejenisnya. Bagi pedagang kaki lima yang berjualan lebih 8 (delapan) jam, umumnya mereka memiliki kios atau warung semi permanen mereka berjualan di depan rumah atau menyewa *space* di depan toko atau ritel modern.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa pokok bahasan yang menjadi kendala dan juga harapan dari pelaku PK5 kota Makassar, antara lain adalah: Pedagang PK5 banyak mengalami kesulitan bahan baku, penagihan redistribusi yang

diiterima oleh PK5 secara tidak jelas, harapan PK5 agar pemerintah memperbanyak event dan kegiatan promosi, dan sudah adanya kesadaran akan ketertiban dan kebersihan Relokasi dan desentralisasi oleh PK5.

Terdapat 8 strategi yang dapat dijadikan strategi prioritas dan strategi alternatif, yang terdiri dari lima strategi prioritas dan tiga strategi alternatif yang direkomendasikan oleh peneliti. Strategi Prioritas, terdiri dari: registrasi dan pembuatan database PK5, pemberdayaan ekonomi pelaku PK5, Penataan lokasi PK5, menyatukan persepsi dalam pengelolaan PK5, pengendalian dan pengawasan berkesinambungan dan terpadu. Sedangkan strategi alternatif terdiri dari: penundaan penggusuran & dialog dengan pemda, pembatasan jumlah pedagang dalam satu lokasi, mensyaratkan setiap pengelola gedung/pabrik/kompleks perumahan untuk menyediakan lokasi tertentu bagi PK5.

Apapun strategi yang dipilih oleh Pemerintah Kota Makassar dalam menata dan memberdayakan PK5, harus ada persepsi pada pemerintah kota bahwa PK5 dapat berkontribusi signifikan dan positif dalam pembangunan kota Makassar apabila mampu ditata dan diberdayakan secara manusia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan tata kota Makassar agar menjadi kota yang lebih tertib dan indah terkait adanya PK5, antara lain dengan cara: penataan lokasi PK5 melalui pembentukan pasar sentra PK5 dan Pengendalian dan pengawasan PK5 secara berkesinambungan dan terpadu. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah kota untuk mempertahankan keberadaan PK5 Kota Makassar agar tidak menghilangkan mata pencaharian masyarakat, antara lain dengan membuat data base dan road map pengembangan pelaku PK5 sehingga memiliki tahapan pengembangan dan pada level ekonomi tertentu mereka dapat keluar dari kelompok PK5 (dari sektor informal menjadi sektor formal).

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Abstrak.....	iii
Ringkasan Eksekutif	iv
Daftar Isi	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Pernyataan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penelitian.....	2
1.4 Manfaat Penelitian	2
1.5 Indikator Keberhasilan.....	3
1.6 Keluaran (output) Penelitian.....	3
1.7 Dampak (outcome) Penelitian	3
BAB II. TINJAUAN LITERATUR	4
2.1 Defenisi dan Karakteristik PK5	4
2.2 Terbentuknya PK5 di Kota Makassar dan Dampaknya.....	5
2.3 Tata Ruang Kota.....	6
BAB III. METODE PENELITIAN.....	11
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	11
3.2 Jenis dan Sumber Data	11
3.3 Metode Pengambilan Data	12
3.4 Metode Analisis Data.....	12
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	14
4.1 Deskripsi Wilayah Kota Makassar.....	14
4.1.1 Profil Wilayah.....	14
4.1.2 Orientasi Wilayah	14
4.1.3 Kondisi Perekonomian Daerah	14
4.2 Peta Persebaran PK5 Kota Makassar.....	15
4.3 Kajian Pedagang Kaki Lima Terhadap Pembangunan Daerah Kota Makassar.....	16
4.4 Analisis SWOT.....	33
4.5 Strategi Penataan dan Pemberdayaan PK5 di Kota Makassar	34
BAB V PENUTUP	43
5.1 Simpulan.....	43
5.2 Rekomendasi	43
DAFTAR PUSTAKA	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota Makassar sebagai kota metroplitan yang memiliki luas 175 ribu km merupakan kota terbesar di Indonesia bagian Timur dengan jumlah penduduk sebanyak 1,6 juta jiwa. Persoalan PK5 (Pedagang Kaki Lima) merupakan isu perkotaan yang sering muncul di berbagai media massa khususnya di kota Makassar. Setidaknya terdapat beberapa isu yang penting yang terkait dengan PK5 di perkotaan: adanya dominasi sektor formal atas sektor informal termasuk PK5 di perkotaan sehingga menimbulkan konflik sosial yang memerlukan penanganan yang lebih berkelanjutan (Budiharjo, 1999); marginalisasi ekonomi sektor informal termasuk PK5 yang menimbulkan berbagai permasalahan seperti ketidaktertiban, limbah, tidak adanya perlindungan jiwa, eksploitasi anak, persaingan tidak sehat, ketiadaan perlindungan hukum, sulitnya pemberdayaan karena mobilitas, dan timbulnya struktur paralel dimana terdapat aliran uang resmi dan tidak resmi sehingga perlu upaya perbaikan fisik dan non fisik yang mensyaratkan formalisasi (Sarosa, 2011); PK5 sebagai bagian dari pasar tradisional merupakan aset ekonomi, sosial, dan budaya dimana keberlanjutannya seharusnya dipertahankan sebagai bagian dari keberagaman untuk menciptakan lingkungan dan kota yang berkelanjutan (Harisah dan Arima, 2012).

Sektor informal pedagang kaki lima mempunyai peranan yang sangat besar untuk meningkatkan perekonomian terutama masyarakat ekonomi lemah dan sektor ini juga menyerap tenaga kerja yang mempunyai keahlian yang relatif minim. Peningkatan jumlah pedagang kaki lima yang berjualan dipinggir jalan dibandingkan sejak beberapa puluh tahun yang lalu terus bertambah setiap tahunnya. Pedagang kaki lima dapat lebih mudah untuk dijumpai konsumennya dari pada mereka yang berada pada lokasi berdagang yang tetap seperti pasar tradisional maupun pasar modern (Heryanto, 2012). Pedagang kaki lima selalu memanfaatkan tempat-tempat yang senantiasa dipandang sebagai profit misalkan pusat kota, tempat keramaian hingga tempat-tempat yang dinilai berpotensi untuk menjadi objek wisata (Prasetyo, 2003). PK5 merupakan salah satu cara masyarakat dalam mencari nafkah tanpa memperdulikan dampak aktifitas mereka terhadap lingkungan sekitarnya.

Kebijakan tentang pengaturan tempat usaha bagi pedagang kaki lima pada dasarnya

sudah tertuang pada Keputusan Walikota Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Makassar dimana Bab II Pasal 2 dijelaskan tentang adanya Pengaturan Tempat Usaha disebutkan bahwa setiap daerah milik jalan (Damija) Kota Makassar tidak dibolehkan untuk ditempati oleh pedagang kaki lima karena peruntukannya hanya untuk pengguna jalan. Dalam perkembangannya, Pemerintah Kota Makassar juga menerbitkan peraturan daerah Kota Makassar yang lebih spesifik mengatur tentang adanya tempat-tempat atau jalan-jalan yang tidak dibolehkan oleh pedagang kaki lima berdagang. Adapun peraturan tersebut yaitu tertuang pada Peraturan Walikota Nomor 44 tahun 2002 tentang Penunjukan Beberapa Tempat Pelataran Yang Dapat Dan Yang Tidak Dapat Dipergunakan Oleh Pedagang Kaki Lima dalam Wilayah Kota Makassar dan juga Keputusan Walikota Makassar Nomor 651 tahun 2007 tentang Kawasan Segi Empat Jalan Sebagai Percontohan Kebersihan dan Penegakan Peraturan Daerah Kota Makassar. Selain itu Perwali No. 20 tahun 2004 tentang Prosedur tetap (Protap) penertiban bangunan dan Pembinaan PK5 Kota Makassar dimana dijelaskan PK5 di Kota Makassar sepenuhnya dibina oleh setiap Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan yang ada di Kota Makassar (Riskasari dan Thahir, 2017). Namun kebutuhan akan ruang baik sebagai tempat tinggal maupun tempat untuk bekerja masuk dalam kelompok kebutuhan tingkat pertama sebagai kebutuhan biologis dan fisiologis bagi manusia. Menurut Budiharjo, 1999 agar sebuah kota bisa berkelanjutan maka kota harus dilandaskan kepada prinsip demokrasi yang berarti pemerataan untuk semua kalangan, termasuk dalam hal ini adalah bagaimana membuat keseimbangan penggunaan ruang baik untuk sektor formal (contoh: Mall) maupun sektor informal (contoh: PK5).

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian mengenai pengelolaan dan penataan PK5 agar dapat meningkatkan keberhasilan tata kota dengan tetap memprioritaskan kebutuhan ekonomi sosial masyarakat oleh pemerintah kota Makassar penting untuk dilakukan.

1.2. Pernyataan Masalah

Permasalahan secara umum adalah mengenai tingkat keberhasilan tata kota dengan tetap memprioritaskan kebutuhan ekonomi sosial masyarakat oleh pemerintah kota Makassar penting untuk dilakukan. Secara khusus, permasalahan penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

1. Bagaimana distribusi dan kondisi sosial ekonomi PK5 Kota Makassar saat ini

2. Bagaimana upaya untuk meningkatkan tata kota Makassar agar menjadi kota yang lebih tertib dan indah
3. Bagaimana upaya mempertahankan keberadaan PK5 Kota Makassar agar tidak menghilangkan mata pencaharian masyarakat

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mengkaji pengelolaan dan penataan PK5 kota Makassar. Secara khusus, tujuan penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui distribusi, dan kondisi sosial ekonomi PK5 saat ini .
2. Untuk mengetahui upaya tata kota Makassar agar menjadi kota yang lebih tertib dan indah
3. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan agar keberadaan PK5 tetap dapat dipertahankan sehingga tidak menghilangkan mata pencaharian masyarakat

1.4 Manfaat Penelitian

Data dari penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh pemerintah kota Makassar dalam perumusan kebijakan untuk menentukan aturan tentang tempat usaha bagi pedagang kaki lima dan penentuan pengembangan tata kota kota Makassar. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemkot secara khusus dalam menentukan kebijakan mengenai upaya peningkatan ekonomi masyarakat.

1.5 Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan dari penelitian ini adalah diperoleh data mengenai distribusi dan kondisi sosial ekonomi PK5 di Kota Makassar. Selain itu, diperoleh rekomendasi mengenai upaya tentang pengaturan tempat usaha bagi pedagang kaki lima dan rekomendasi mengenai upaya pengelolaan PK5 yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Kota Makassar.

1.6. Keluaran (Output) Penelitian

1. Tersedianya data dan informasi distribusi dan kondisi sosial ekonomi PK5 di Kota Makassar.
2. Tersedianya informasi mengenai upaya perbaikan tata Kota Makassar sehingga menjadi kota yang lebih tertib dan indah

3. Tersedianya data dan informasi mengenai upaya untuk mempertahankan keberadaan PK5 untuk peningkatan ekonomi masyarakat.

1.7. Dampak (Outcome) Penelitian

1. Menghasilkan rumusan mengenai distribusi dan kondisi sosial ekonomi PK5 Kota Makassar
2. Menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan pemerintah kota Makassar untuk memaksimalkan tata kota dan peningkatan ekonomi masyarakat melalui keberadaan PK5.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi dan Karakteristik PK5

Menurut Perpres RI No. 125 Tahun 2012 tentang koordinasi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, PK5 adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

Pemerintah bersama pemerintah daerah berkoordinasi melakukan penataan dan pemberdayaan PK5 dilaksanakan melalui:

a. Pendataan dan pendaftaran PK5

Pendataan dan pendaftaran PK5 meliputi: lokasi, jenis tempat usaha, bidang usaha, modal usaha, dan volume penjualan.

b. Penetapan lokasi PK5

penetapan lokasi PK5 merupakan lokasi binaan yang terdiri atas lokasi permanen dan lokasi sementara yang ditetapkan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

c. Pemindahan dan penghapusan lokasi PK5

Pemindahan dan penghapusan Lokasi PK5 dilaksanakan pada lokasi PK5 yang bukan peruntukannya.

d. Peremajaan lokasi PK5

Peremajaan lokasi PK5 sebagaimana merupakan upaya perbaikan kualitas lingkungan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukannya.

e. Perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PK5

Perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PK5 merupakan penyediaan ruang untuk kegiatan PK5 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

Secara garis besar karakteristik PK5 (Ismawan, 2002), digambarkan sebagai berikut:

a. Informalitas

Sebagian besar PK5 bekerja diluar kerangka legal dan pengaturan yang ada, maka keberadaan mereka pun tak diakui oleh pemerintah setempat.

b. Mobilitas

Aspek informalitas dari PK5 juga membawa konsekuensi tiadanya jaminan keberlangsungan aktifitas yang dijalani, sehingga usaha ini merupakan sektor yang relatif mudah dimasuki dan ditinggalkan. Apabila terdapat peluang maka dengan banyak pelaku yang turut serta, sebaliknya apabila terjadi perubahan peluang ke arah negatif pelakunya akan berkurang.

c. Kemandirian

Umumnya para pedagang mencari modal sendiri tanpa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Lembaga keuangan lokal dengan berbagai peraturan dan prinsip kehati-hatian membatasi kemungkinan berhubungan dengan para PK5, karena tiadanya jaminan yang dimiliki mereka.

d. Hubungan dengan sektor formal

Meskipun kehadiran mereka tidak diakui, namun peranan mereka dalam membantu sektor formal sangatlah besar, terlebih lagi dalam hal pendistribusian barang kepada konsumen.

Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik(BPS), karakteristik sektor informal sebagai berikut:

1. Mandiri. Pada umumnya usaha yang dilakukan tanpa ada bantuan dari pekerja/buruh artinya dikerjakan langsung oleh pemimpin perusahaan.
2. Modal. Modal yang dikeluarkan dalam melakukan usaha berasal dari milik sendiri.
3. Waktu. Rata-rata waktu kerja sektor informal dalam sehari, paling lama adalah 9 jam.
4. Pinjaman. Dalam menjalankan usaha mayoritas, mereka tidak memanfaatkan bantuan pinjaman pemerintah ataupun bank lokal. Tetapi mencari pinjaman lainnya, yang berasal dari keluarga atau kerabat terdekat. Beberapa alasan, mereka yang tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah adalah ketidak tahuan adanya bantuan, ketidak tahuan dalam prosedur pengajuan atau penerimaan bantuan dan penolakan proposal dari lembaga yang bersangkutan.

2.2 Terbentuknya PK5 di Kota Makassar dan Dampaknya

Berdasarkan hasil riset (Harisah, 2014) setidaknya terdapat beberapa fenomena terbentuknya PK5 di Kota Makassar, ditinjau dari waktu terbentuknya yaitu:

1. Spontan karena ada kegiatan keramaian yang terencana dan informasinya bisa diketahui oleh PK5 tertentu, ada musim buah, dan atau ada musibah tertentu seperti

kebakaran. Biasanya PK5 jenis ini adalah yang bersifat movable atau yang dapat berpindah tempat.

2. Perlahan, bertahap dan tidak sistematis karena ada keraguan kemungkinan terjadinya penggusuran, terutama PK5 yang menguasai tempat-tempat yang tidak dikontrol penggunaannya oleh pemiliknya, jadi teritorinya dibangun secara bertahap.
4. Perlahan, bertahap dan sistematis, teramati dan terencana oleh PK5 secara individual
1. atau berkelompok atau terorganisir, dengan pola tersebar di beberapa tempat, atau mengumpul di satu lokasi.

Berdasarkan penggunaannya, proses terbentuknya PK5 di Kota Makassar dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Secara individual/teritori individual

Beberapa PK5 secara individual berusaha membuat teritori di tempat-tempat yang diyakininya dapat menarik konsumen.

2. Secara berkelompok/teritori kelompok

Beberapa PK5 secara bersama membentuk dua atau lebih kelompok supaya lebih kuat dalam membentuk teritori di ruang-ruang publik yang diyakininya dapat menarik konsumen, baik dengan cara menjual barang yang sejenis, maupun tidak.

3. Kombinasi individual dan kelompok/kombinasi teritori keduanya

Kadang-kadang secara individual dan berkelompok membentuk teritori di ruang-ruang publik, semi publik, dan privat untuk menarik konsumen berdasarkan ikatan pertemanan, dan kekerabatan, asal daerah, suku, dan sebagainya.

PK5 sebagai salah satu kegiatan ekonomi informal perkotaan kehadirannya membawa beberapa permasalahan bagi perkotaan di antaranya, yaitu (Riskasari dan Thahir, 2017) :

1. Penyalahgunaan penggunaan peruntukan ruang publik.
2. Munculnya ancaman keamanan lingkungan.
3. Terabaikannya kebersihan lokasi sektor informal.
4. Adanya eksploitasi anak-anak usia sekolah.
5. Terjadinya persaingan yang tidak sehat antara sektor informal dan sektor formal.
6. Rentannya pemerasan oleh pihak-pihak tertentu karena ketiadaan perlindungan hukum.
7. Munculnya setoran ilegal (pungutan liar) yang mesti dibayarkan kepada pihak tertentu di luar setoran resmi.

Sedangkan menurut Dewanto, 2104 masalah-masalah yang ditimbulkan oleh PK5, yaitu :

1. Menurunkan Kualitas fisik suatu kawasan tertentu karena tidak tertata,
2. Mengganggu sirkulasi pergerakan masyarakat,
3. Menimbulkan kesan kumuh,
4. Terganggunya lahan parkir karena digunakan sebagai lahan usaha oleh PK5,
5. Penggunaan trotoar sesuai fungsi peruntukannya,
6. Kehadiran PK5 menimbulkan sampah yang tidak sedikit setiap harinya.

Keuntungan yang muncul dari kehadiran PK5 bagi perkotaan (Riskasari & Thahir, 2017) :

1. Mampu menyediakan lapangan kerja sehingga mampu menyerap tenaga kerja
2. Menyediakan barang yang murah bagi masyarakat
3. Bisa jadi cikal bakal sektor formal

2.3 Tata Ruang Kota

Menurut D.A. Tisnaadmidjaja, yang dimaksud dengan ruang adalah “wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas kehidupan yang layak”.

Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Penyelenggaraan penataan ruang harus memperhatikan hal sebagai berikut:

1. Kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana.
2. Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan.
3. Geostrategi, geopolitik, dan geoeкономи.

Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota meliputi:

1. Perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Pada Undang-Undang Penataan Ruang, perencanaan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi. Perencanaan Pembangunan Nasional terbagi atas tiga jenis perencanaan yaitu: Rencana Jangka Panjang, Rencana Lima Tahunan, dan Rencana Tahunan.

2. Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.

Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya

3. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.

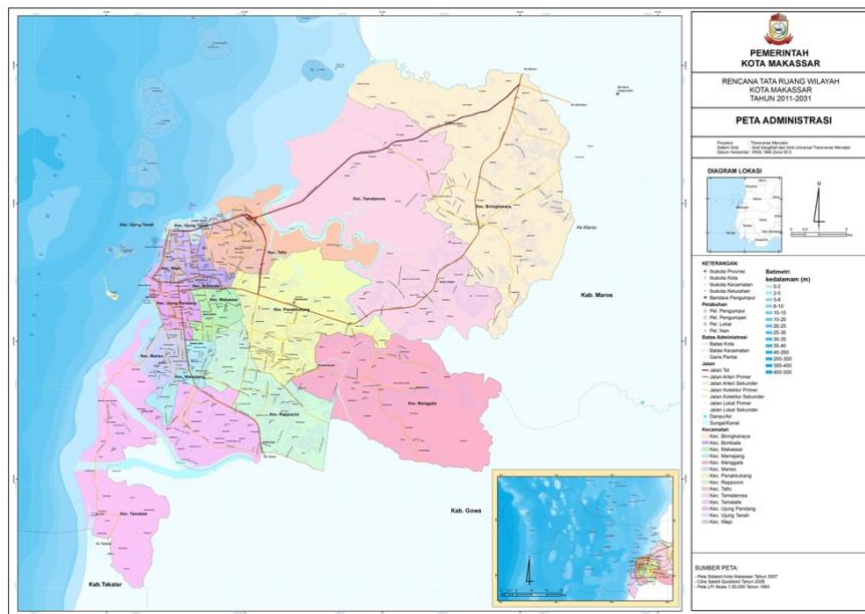
Adanya Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah jika adanya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah sebagai usaha untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan rencana tata ruang.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar pada 15 kecamatan di kota Makassar. Waktu pengambilan data di lapangan dan instansi yang terkait membutuhkan waktu kurang lebih 3 bulan dan pengolahan data dan perumusan rekomendasi membutuhkan waktu 1 bulan.



Gambar 3.1. Lokasi Penelitian

3.2 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data primer (observasi langsung) dan data sekunder (observasi tidak langsung). Obyek kajian ini adalah pelaku PK5, sehingga populasi adalah keseluruhan pelaku PK5 Kota Makassar.

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Sampelnya adalah pelaku PK5 di Kota Makassar, dan instansi terkait Pedagang Kaki Lima (PK5) di Kota Makassar dengan cara *Focus Group Discussion* (FGD).

3.3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan observasi, wawancara, Survey dan Focus Grup Discussion di Kecamatan Kota Makassar yang terpilih Biringkanaya, Panakukang, Manggala, Tamalate, dan Bontoala. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan dan sekunder. Sumber data Primer ini diperoleh dengan observasi langsung dilapangan terkait aktifitas PK5, pembagian kusioner kepada respon individu pelaku UMKM dan PK5 yang ditemui dan di Survey, melakukan Focus Grup Discussion. Sementara data sekunder diperoleh dari penelitian terdahulu terkait PK5, publikasi pemerintah, peraturan pemerintah, dan publikasi dari media massar seperti koran dan majalah.

3.4. Wawancara Mendalam, Focus Grup Discussion dan Survei Lapangan

Wawancara mendalam dilakukan pada tanggal 20 Juli sampai 15 Agustus kepada pedagang Kaki Lima. Wawancara ini dimaksudkan untuk menggali lebih dalam terhadap permasalahan yang dihadapi oleh PK5 terutama kaitanya terhadap kebijakan pemerintah, masyarakat, permodalan usaha. Hal lain yang di tanyakan adalah program pemerintah yang akan merelokasi PK5, dan pertanyaan saran PK5 terhadap penataan pengelolaan PK5 di kota Makassar.

Wawacara ini dilakukan dengan menemui secara acak PK5 yang beroperasi di daerah Manggala dan Panakukang, Pada saat pelatihan dinas Koperasi dan UKM yang dilakukan terhadap pelaku UMKM dan Pk5 di kota Makassar pada tanggal 23-s/d26 Juli 2018 di hotel alden dan Ramayana. Wawancara dilakukan setelah terlebih dahulu memberikan kusioner pertanyaan dan kemudian dipilih pelaku UKM dan PK5 yang memiliki waktu untuk di wawancara mendalam.

Selain itu diadakan juga Kegiatan Focus Grup Discussion dengan mengundang pedagang kaki lima yang diwakili 7 orang peserta pada tanggal 20 Agustus 2018 bertempat di Laboratorium hasil Kehutanan Universitas Hasanuddin. FGD ini dilakukan untuk mengetahui lebih fokus terhadap permasalahan-permasalahan dari pelaku UKM dan PK5 yang ada dikota Makassar.

Survey lapangan dilakukan sebelum diadakan wawancara mendalam dan FGD. Media pengumpulan data yang digunakan dalam survey ini adalah berupa kuisisioner yang dibagikan secara acak. kepada responden pelaku PK5 yang beroperasi di wilayah

Biringkanaya, Panakukang, Manggala, Tamalate, dan Bontoala. Responden berjumlah 25 orang dengan perbandingan jenis kelamin wanita:laki adalah 3:2. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku PK5 umumnya adalah perempuan meskipun bukan sebagai kepala rumah tangga. Hasil survey ini digunakan untuk memperkuat penjelasan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan FGD.

3.4 Metode Pengambilan data

Untuk mendapatkan data sekunder dan data primer yang akurat maka kajian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

Document Review

Teknik pengumpulan data ini berusaha menelaah berbagai bahan bacaan/pustaka berupa buku-buku, majalah, laporan kegiatan, undang-undang, dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan Pedagang Kaki Lima.

Studi Lapangan (Field Research)

Data yang bersifat keterangan tentang kejadian dikumpulkan melalui teknik wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guideline*).

- Data yang bersifat distribusi/frekuensi dikumpulkan melalui teknik perhitungan atau pencacahan dengan menggunakan kuesioner.
- Data yang bersifat kinerja, nilai-nilai, disiplin, tingkah laku yang laten (*cover behavior*), dan sejenisnya dikumpulkan melalui teknik pengamatan terlibat secara terbatas dan wawancara dilakukan secara *in-depth* dengan menggunakan catatan lapang (*field notes*).

Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan untuk mengetahui distribusi dan kondisi sosial ekonomi PK5. Penelitian lapangan tersebut diantaranya adalah : perhitungan jumlah PK5 di satu titik, klasifikasi PK5 berdasarkan pelaku dan produk yang dijual, tingkat pendapatan PK5, dampak adanya PK5 terhadap lingkungan dan sosial.

Tabel 3.1. Matriks Metode, Alat, Sumber, dan Jenis Data

METODE PENGUMPULAN DATA	MEDIA PENGUMPULAN DATA	SUMBER DATA	JENIS DATA
Observasi	<i>observation sheet</i> dan <i>observation schedule</i>	Gambaran umum kondisi Pedagang Kaki Lima (PK5) di Kota Makassar	Primer
Wawancara/ FGD	<i>interview guide & field notes</i>	Balitbangda, Dinas sosial, Dinas perekonomian dan perdagangan, dinas lingkungan hidup	Primer dan Sekunder;
Survey Lapangan	Kuesioner	Pelaku PK5	Primer dan Sekunder
Penelitian lapangan	Penelitian lapangan (perhitungan jumlah PK5 di satu titik, klasifikasi PK5 berdasarkan pelaku dan produk yang dijual, tingkat pendapatan PK5, dampak adanya PK5 terhadap lingkungan dan sosial.)	Lokasi persebaran PK5	Primer

3.5. Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diedit, ditabulasi, dan diverifikasi terlebih dahulu. Metode analisis data yang digunakan dalam kajian ini terdiri atas 2 metode, yaitu : (1) Analisis Statistik Deskriptif, dan (2) Analisis SWOT. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi jawaban responden terhadap variabel atau indikator dalam bentuk nilai rata-rata (*mean*), dan prosentase (%). Analisis SWOT digunakan sebagai dasar dalam merumuskan strategi dan kebijakan Pedagang Kaki Lima (PK5). SWOT merupakan akronim yang terdiri dari kata-kata kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*thtreats*).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4. 1 Deskripsi Wilayah Kota Makassar

4.1.1 Profil Wilayah

Kota Makassar merupakan kota terbesar keempat di Indonesia dan terbesar di Kawasan Timur Indonesia memiliki luas areal 175,79 km² dengan penduduk 1.112.688, sehingga kota ini sudah menjadi kota Metropolitan. Sebagai pusat pelayanan di KTI, Kota Makassar berperan sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara dan pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Secara administrasi kota ini terdiri dari 14 kecamatan dan 143 kelurahan. Kota ini berada pada ketinggian antara 0-25 m dari permukaan laut. Penduduk Kota Makassar pada tahun 2000 adalah 1.130.384 jiwa yang terdiri dari laki-laki 557.050 jiwa dan perempuan 573.334 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 1,65 %. Masyarakat Kota Makassar terdiri dari beberapa etnis yang hidup berdampingan secara damai seperti Etnis Bugis, etnis Makassar, etnis Cina, etnis Toraja, etnis Mandar dll. Kota dengan populasi 1.112.688 jiwa ini, mayoritas penduduknya beragama Islam. Dalam sejarah perkembangan Islam, Makassar adalah kota kunci dalam penyebaran agama Islam ke Kalimantan, Philipina Selatan, NTB dan Maluku. Munculnya kasus SARA di Ambon -- Maluku dan Poso pada beberapa tahun terakhir ini, tidak terlepas dari peran strategis Makassar sebagai kota pintu di wilayah Timur Indonesia. Kekristenan di Makassar dalam beberapa tahun terakhir ini sering menjadi sasaran serbuan. Kota Makassar disamping sebagai daerah transit para wisatawan yang akan menuju ke Tana Toraja dan daerah-daerah lainnya, juga memiliki potensi obyek wisata seperti : Pulau Lae-lae, Pulau Kayangan, Pulau Samalona, Obyek wisata peninggalan sejarah lainnya seperti: Museum Lagaligo, Benteng Somba Opu, Makam Syech Yusuf, makam Pangeran Diponegoro, Makam Raja-raja Tallo, dan lain-lain. Fasilitas penunjang tersedia jumlah hotel 95 buah dengan jumlah kamar 3.367 cottage wisata sebanyak 76 buah, selain itu juga terdapat obyek wisata Tanjung Bunga yang potensial. Adapun luas wilayah Kota Makassar dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Luas Wilayah Kota Makassar

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)
1	Tamalanrea	31,84
2	Biringkanaya	48,22
3	Manggala	24,14
4	Panakuk kang	17,05
5	Tallo	5,83
6	Ujung Tanah	5,94
7	Bontoala	2,10
8	Wajo	1,99
9	Ujung Pandang	2,63
10	Makassar	2,52
11	Rappocini	2,93
12	Tamalate	20,21
13	Mamajang	2,25
14	MAriso	1,82
	Total	175,77

Sumber: Libang *Kompas* diolah dari Badan Pusat Statistik Kota Makassar 2001

4.1.2 Orientasi Wilayah

Secara geografis Kota Metropolitan Makassar terletak di pesisir pantai barat Sulawesi Selatan pada koordinat 119°18'27,97" 119°32'31,03" Bujur Timur dan 5°00'30,18" - 5°14'6,49" Lintang Selatan dengan luas wilayah 175.77 km² dengan batas-batas berikut :

- Batas Utara : Kabupaten Pangkajene Kepulauan
- Batas Selatan : Kabupaten Gowa
- Batas Timur : Kabupaten Maros
- Batas Barat : Selat Makasar

Secara administrasi Kota Makassar terbagi atas 14 Kecamatan dan 142 Kelurahan dengan 885 RW dan 4446 RT Ketinggian Kota Makassar bervariasi antara 0 - 25 meter dari permukaan laut, dengan suhu udara antara 20° C sampai dengan 32° C. Kota Makassar diapit dua buah sungai yaitu: Sungai Tallo yang bermuara disebelah utara kota dan Sungai Jeneberang bermuara pada bagian selatan kota.

Sebaran dan Kepadatan Penduduk Secara keseluruhan kepadatan Kota Makassar sebesar 6.330 jiwa/km², namun konsentrasi wilayah yang paling padat penduduknya terdapat di lima kecamatan yaitu Tallo, Bontoala, Makassar, Mamajang dan Mariso yang kepadatan penduduknya berada di atas 20.000 jiwa/km².

4.1.3 Kondisi Perekonomian Daerah

Sejalan dengan perkembangan kota Makassar, kegiatan ekonomi juga semakin pesat, ini ditandai dengan meningkatnya jumlah perusahaan perdagangan yang sekarang telah mencapai 14.584 unit usaha yang terdiri dari 1.460 perdagangan besar, 5.550 perdagangan menengah dan 7.574 perdagangan kecil. Kemudian terdapat 21 industri besar dan 40 industri sedang yang terkonsentrasi di kecamatan Biringkanaya dan konsentrasi industri besar kedua terdapat di kecamatan Tamalanrea dan kecamatan Panakkukang masing-masing 5 unit. Sementara itu kawasan perdagangan utama kota Makassar terdapat di Pasar Sentral (Makassar Mall) sebagai pusat dan wilayah Panakkukang dan Daya sebagai sub pusat pelayanan selain itu terdapat 2 Mall (Mall Ratu Indah dan Latanete Plaza) dan kawasan perdagangan Somba Opu, sedangkan Jl. Jend. Sudirman, Jl. DR. Ratulangi cenderung untuk berubah menjadi kawasan perdagangan.

Perdagangan kota Makassar tergolong maju. Pusat-pusat perniagaan dari pasar-pasar tradisional, pasar grosir sampai mal-mal modern berkembang pesat. Sektor perdagangan terkait erat dengan sektor industri dan transportasi. Untuk mengantisipasi perkembangan industri dan tata kota, pemda telah menyediakan lahan untuk kawasan industri seluas 200 hektar dengan nama PT Kawasan Industry Makassar (KIMA).

4.2 Peta Persebaran PK5 Kota Makassar

Menurut Mc. Gee dan Yeung dalam (Susilo, 2011) pola penyebaran PK5 dapat dibagi menjadi dua, yaitu pola penyebaran PK5 memanjang (*linier agglomeration*) dan pola penyebaran PK5 secara mengelompok (*focus agglomeration*). Pola penyebaran PK5 memanjang (*linier agglomeration*) umumnya terjadi di sepanjang atau dipinggir jalan utama (*main street*) atau pada jalan yang menghubungkan jalan utama. Dapat dikatakan pola perdagangan ini ditentukan oleh pola jaringan jalan itu sendiri, sehingga jarak antara satu stan PK5 satu dengan yang lain tidak beraturan.

Berdasarkan berita yang dimuat di harian Fajar, tahun 2016. Pemkot Makassar mulai menata Pedagang Kaki Lima (PK5) dengan membuat titik- titik lokasi yang akan menjadi PK5 Centre, antara lain: Jl Boulevard, Nikel Raya, Tamangapa Raya, Metro Tanjung Bunga, depan Rusunawa Mariso, RA Kartini dan Hertasning. PK5 tidak diperbolehkan lagi menggelar dagangannya di trotoar dan di bahu jalan. Anggaran untuk penataan PK5 sekitar Rp30 miliar. Setiap titik akan mengakomodasi PK5 pada masing-masing kawasannya. PK5 Centre nantinya terintegrasi menjadi kawasan wisata. Halte bus akan dibangun di setiap lokasi PK5 Centre. Kios pedagang menggunakan konsep Kaki Limata. Ukurannya 1x2 meter pergerobak. Satu titik dapat menampung sekitar 200-300 pedagang. Luas dan daya tampung setiap titik bervariasi. Kawasan PK5 Center di Jl Nikel sekitar 6.000 meter persegi dengan daya tampung sekitar 200 pedagang. Lokasi di RA Kartini (Karebosi) seluas 12.000 meter persegi dan menampung 400 pedagang. Lokasi di Jl Tamangapa Raya seluas 10.000 meter persegi dengan daya tampung 300 pedagang. Titik di depan Rusunawa Mariso seluas 6.000 meter persegi dengan daya tampung 100 pedagang, serta di Metro Tanjung Bunga sekitar 6.000-7.000 meter dengan daya tampung 200 pedagang.

Di Kota Makassar, pola penyebaran PK5 memanjang terdapat pada kawasan pusat pendidikan, sekitar pusat-pusat perbelanjaan, atau di sekitar pemukiman padat penduduk. Adapun persebaran PK5 yang berada di sekitar kawasan pendidikan, antara lain berada di jalan Perintis dan jalan hertasning, dan jalan antang raya. Sedangkan PK5 yang berada pada kawasan perumahan, antara lain di jalan Perumnas Antang raya dan BTP. Pola penyebaran secara memanjang atau linier agglomeration tersebut dicirikan oleh aktivitas PK5 tersebut berjualan disepanjang jalan dengan mengikuti pola jaringan jalan dan lokasi aktivitas PK5 terhubung dengan jalan utama yang selalu ramai dilalui oleh pengguna jalan raya. Pola penyebaran PK5 yang mengikuti pola jaringan jalan ini menyebabkan penurunan terhadap keindahan kota, selain itu, tidak jarang kendaraan konsumen diparkir di badan Jalan, sehingga berakibat pada terganggunya lalu lintas.



a. PK5 di Jalan Perumnas Antang Raya b. PK5 di Jalan Hertasning

Gambar 4.1 Kawasan PK5 Kota Makassar dengan pola Penyebaran Linear

Pola penyebaran mengelompok atau *focus agglomeration* biasanya terjadi pada kawasan aktivitas formal seperti pada kawasan pasar atau pusat perbelanjaan, yang selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat serta itu taman dan lapangan. Pola Penyebaran mengelompok ini jika dikaitkan dengan aktivitas PK5 di Kota Makassar terjadi pada kawasan pusat rekreasi/Taman kota/lapangan dan pusat perbelanjaan dengan titik-titik penyebaran lokasi PK5 diantaranya sebagai berikut:

1. Jalan RA. Kartini

Terdapat sekitar 300 stan PK5 yang telah disediakan oleh pemerintah. PK5 di tempat ini sudah tertata rapi dan memiliki fasilitas fasilitas, seperti gedung pengelola, kebersihan, parkir, air bersih, PLN, dan pengamanan. Pedagang Kaki Lima (PK5) Center Kartini ini sekarang disebut dengan *Kanre Rong ri Karebosi*. Kawasan kaki lima ini dekat dengan pusat perbelanjaan yaitu mall karebosi.



Gambar 4.2 Kawasan PK5 di Jalan RA. Kartini

2. Depan pantai losari

Kawasan PK5 didepan pantai losari mayoritas produk dagangannya berupa pisang epe. Sekitar 174 pedagang pisang epe di di kawasan ini kerap mendapatkan pembinaan dari pemerintah kota, sehingga kumpulan PK5 ini sudah tertata dengan rapi. Adanya PK5 dikawasan ini bahkan menjadi kebanggaan kota Makassar karena mampu memperkenalkan kuliner khas kota Makassar sehingga menjadi salah satu landmark Kota Makassar.



Gambar 4.3 Kawasan PK5 didepan Pantai Losari

3. Jalan Nikel

Kawasan PK5 di Jalan Nikel ini letaknya berseberangan dengan Damalia Hotel dan berada dekat dengan kawasan perumahan. Terdapat sekitar 32 stan PK5 bersifat semi permanen yang menjual produk makanan. tahun ini, pemerintah juga akan membangun PK5 Center di Jalan Nikel Raya. Hal itu karena PK5 Center khusus kawasan Nikel Raya masih dalam tahap perampungan desain. Di kawasan tersebut diprediksi bisa menampung sampai 200 pedagang. (sumber: Sindo, 2018)



Gambar 4.4 Kawasan PK5 di Jalan Nikel

4. Jalan Hertasning

Pada kawasan PK5 ini terdapat sekitar 20 stan yang berbentuk gelaran. Umumnya produk yang dijual adalah berupa makanan.



Gambar 4.5 Kawasan PK5 di Jalan Hertasning

3. Jalan dekat waduk antang, Tamangapa

Kumpulan PK5 di dekat danau antang ini baru ramai pada tahun 2018 ini. Awalnya PK5 yang berjualan ditempat ini hanya berjumlah 2-3 orang yang menjual ikan menggunakan media meja, lambat laun karena banyaknya masyarakat Tamangapa yang menjadikan kawasan danau sebagai salah satu tempat yang digunakan untuk menikmati keindahan matahari pada sore hari, maka banyak pula PK5 muncul di kawasan ini. Setidaknya terhitung bulan Oktober 2018 ini, terdapat sekitar 25 PK5 yang menjajakan dagangannya tiap sore. Adapun produk jualannya berupa: ikan hasil waduk serta aneka makanan dan minuman. Adanya aktivitas PK5 di kawasan ini masih menimbulkan beberapa kesemrawutan, seperti timbulnya kemacetan disekitar jalan Waduk. PK5 pada kawasan ini, umumnya menggunakan media untuk berdagang berupa: meja, gerobak, dan mobil dagangan. Ramainya pengunjung waduk menyebabkan banyaknya pedagang yang terus berdatangan dan kurang memperhatikan faktor keselamatan. Salah satu kecelakaan yang mengancam nyawa PK5 pernah terjadi pada kawasan ini. PK5 yang menggunakan media mobil untuk berdagang mengalami kecelakaan karena mobil yang diparkir terlalu dekat dengan bibir waduk, sehingga mobil yang digunakan meluncur kedalam waduk.

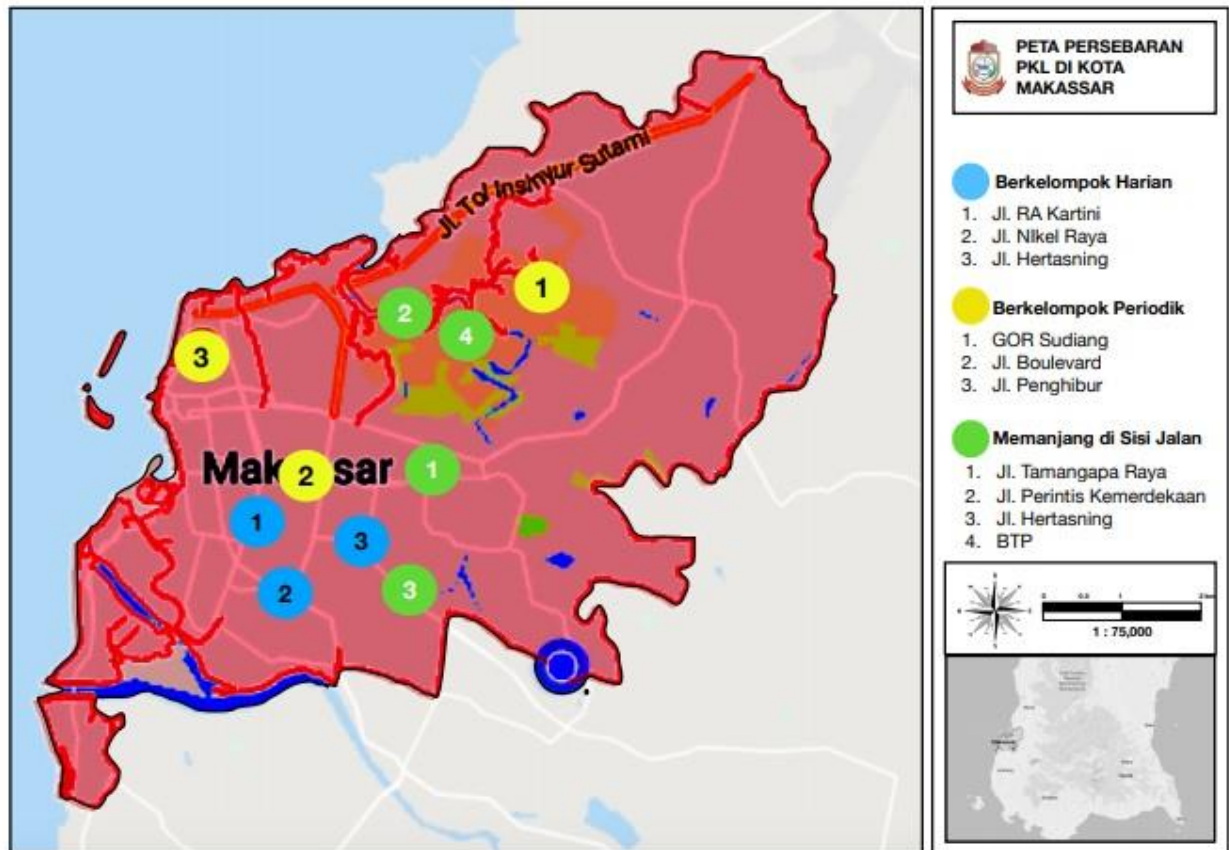
Adanyanya gangguan lalu lintas jalan maupun kecelakaan PK5 akan dapat diminimalisasi dengan adanya pembinaan dan perhatian khusus terhadap PK5 dikawasan ini.



Gambar 4.6 Kawasan PK5 center di sekitar Waduk Tamangapa-Antang

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari koran sindo, 2018 Dinas PU telah menyiapkan anggaran sebesar Rp20 miliar untuk pembangunan tiga PK5 Center. Anggaran ini masing-masing dialokasikan untuk PK5 Center di Jalan Nikel Raya sebesar Rp6,84 miliar, Jalan Metro Tanjung Bunga senilai Rp7,05 miliar, dan Jalan Tamangapa sebesar Rp5,87 miliar. Ketiga PK5 Center ini pernah dianggarkan pada APBD Pokok 2017, tapi tidak terealisasi lantaran perencanaan yang belum matang. Namun, untuk pembangunan PK5 Center di Jalan Tamangapa gagal terealisasi karena lahan belum siap, sedangkan PK5 Center khusus kawasan Nikel Raya masih dalam tahap perampungan desain. Di kawasan tersebut diprediksi bisa menampung sampai 200 pedagang.

Adapun kawasan PK5 lain di Kota Makassar yang termasuk dalam Pola penyebaran mengelompok atau *focus agglomeration* adalah kawasan yang biasa dijadikan *car free day*, yang hanya ada pada hari minggu. Kawasan tersebut, antara lain di Jl. Boulevard, GOR Sudiang, dan di Jl. Penghibur. Peta sebaran PK5 kota Makassar dideskripsikan pada gambar dibawah ini



Gambar 4.7 Peta Persebaran PK5 di Kota Makassar

4.2 Kajian Pedagang Kaki Lima Terhadap Pembangunan Daerah Kota Makassar

PK5 atau Pedagang Kaki Lima merupakan salah satu kategori sektor informal yang kini mendapat perhatian serius dari pemerintah Kota Makassar. Hal ini disebabkan karena sektor informal pedagang kaki lima mempunyai peranan yang sangat besar untuk meningkatkan perekonomian terutama masyarakat ekonomi lemah dan sektor ini juga menyerap tenaga kerja yang mempunyai keahlian yang relatif minim. (Widjajanti, 2012, Heryanto, 2012).

Sektor informal ini digambarkan sebagai bagian dari angkatan kerja di kota yang berada di luar pasar tenaga kerja yang terorganisir. Pada umumnya, yang terlibat dalam sektor informal kebanyakan dalam usia kerja utama (prime age), berpendidikan rendah, upah yang diterima di bawah upah minimum, serta modal usaha yang rendah. Berdasarkan studi yang dilakukan Widjajanti (2012) mengenai sektor informal di Indonesia bahwa sektor informal mempunyai ciri-ciri: (1) Kegiatan usaha yang tidak terorganisir dengan baik, karena usaha ini timbul tanpa menggunakan fasilitas atau kelembagaan yang harus tersedia dari sektor informal. (2) Pada umumnya tidak mempunyai ijin usaha. (3) Pola

kegiatan usaha yang tidak teratur, baik dari segi lokasi usahanya maupun jam kerja. (4) Kebijakan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah biasanya tidak sampai pada sektor ini. (5) Teknologi yang digunakan tradisional. (6) Skala pelayanan dan modal yang relatif kecil. (7) Unit usaha berganti-ganti dari satu sub sektor ke sub sektor yang lain. (8) Tidak memerlukan pendidikan formal untuk menjalankan usahanya. Unit usaha termasuk "one man enterprise", tenaga kerja dari keluarga maupun teman dekat. Hasil produksi atau jasa terutama dikonsumsi oleh masyarakat menengah ke bawah.

Dalam penelitian kali ini kami membagi kelompok informan atau narasumber yakni kelompok pemerintah, pelaku usaha dan PK5, dan masyarakat. Kelompok Pemerintah kita mewawancarai perwakilan dari Dinas Koperasi dan UMKM, Perwakilan dari Dinas Perdagangan, Perwakilan dari Bappeda bidang ekonomi dan Sumber daya, dan Perwakilan dari dinas kebersihan dan pertanahan kota.

Sementara dari kelompok PK5 (pedagang Kaki lima) kita mewawancarai pelaku usaha yang terbagi di kecamatan Panakukang, Biringkanaya, Manggala dan Tamalae. Mereka merupakan pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan atau pada saat mengikuti kegiatan pembekalan dari dinas koperasi dan UKM. Kelompok masyarakat adalah pengguna dari PK5, kelompok yang ingin dipenuhi kebutuhannya dengan kehadiran PK5, kelompok masyarakat yang berlokasi disekitar dimana PK5 tersebut beroperasi yang memiliki kepentingan tidak terganggu oleh aktifitas PK5, baik terhadap ketertiban lingkungan dan kebersihan sekitar.

Adapun jenis kategori atau komoditas barang yang diperdagangkan dilakukan oleh pedagang kaki lima di kota makassar terbagi kedalam **Bahan mentah atau setengah jadi, makanan siap konsumsi, non makanan, dan Jasa**. Kelompok Bahan mentah dan setengah jadi (*unprocessed and semiprocessed foods*) pedagang yang menjual barang seperti daging, buah, sayuran, beras, dan sebagainya. Makanan siap konsumsi (*prepared foods*), terdiri dari bahan bahan yang dapat langsung dikonsumsi saat itu juga, biasanya berupa makanan dan minuman seperti kue-kue, nasi kuning, aneka cemilan, minuman dingin, aneka es dan juice.

Non makanan (*nonfood items*), jenis barang dagangan ini cakupannya lebih luas dan biasanya tidak berupa makanan, misalnya baju kaos dan celana, tekstil, asesoris handphone, obat-obatan, pulsa dan paket internet serta lain lain. Jasa (*services*), yang termasuk dalam kategori jasa pelayanan, seperti tukang semir sepatu, potong rambut, service jam tangan dan sebagainya.

Kepentingan penelitian ini jenis kategori atau komoditas barang yang diperdagangkan kami lakukan penamaan dan penyingkatan yakni bahan mentah dan setengah jadi disingkat BMTH, Kategori makanan siap konsumsi disingkat BMSK, untuk kategori komoditas non makanan disingkat BNMN, dan kategori jasa disingkat BJSA.

Dalam menunjang kegiatan perdagangan PK5 di kota Makassar menggunakan sarana atau prasarana berbentuk (1) Kios, jenis sarana ini biasanya dipakai oleh PK5 yang tergolong menetap secara fisik tidak dapat dipindah pindahkan, dengan bangunan berupa papan-papan yang diatur. (2) Warung semi permanen, sarana fisik PK5 ini berupa gerobak yang diatur berderet ditambah dengan meja dan bangku panjang. Atap menggunakan terpal yang tidak tembus air. (3) Gerobak/kereta dorong, sarana ini ada dua jenis lagi, yaitu yang beratap (sebagai perlindungan barang dagangan dari pengaruh debu, panas, hujan, dan sebagainya) dan tidak beratap. (4) Meja, bentuk sarana ini ada yang beratap dan ada yang tidak beratap. Biasanya dipakai oleh PK5 yang lokasinya tergolong tetap. (5) Gelaran/alas bentuk sarana ini adalah dengan menjajakan barang dagangan diatas tikar atau alas yang digelar. (6) Pikulan/keranjang, biasanya digunakan oleh pedagang keliling (mobile hawkers atau PK5 yang semi menetap. Dengan menggunakan satu atau dua buah keranjang dengan cara dipikul. Bentuk sarana ini bertujuan agar mudah dibawa dan dipindah-pindahkan. (7) Jualan di Mobil merupakan salah satu bentuk yang kini sedang marak digunakan oleh pedagang PK5, dengan berjualan diatas mobil atau kendaraan memudahkan mereka untuk menata jualan mereka.

Secara umum pola pelayanan para PK5 dikota Makassar ini terbagi dua yaitu berpindah dan tetap. Pola Berpindah biasanya mereka berjualan di tepi jalan-jalan yang ramai. Selain itu juga mereka dapat ditemui didepan ruko atau toko yang biasanya mereka sewa oleh pemilik toko tersebut. Pola menetap biasanya bagi PK5 yang memiliki rumah di jalan-jalan ramai dan strategis memanfaatkan halan depan rumah mereka untuk berjualan. Selain itu ada juga PK5 yang membuat rumah semi permanen terbuat dari kayu untuk berjualan, dan biasanya juga mereka tinggal disana.

Waktu operasional para Pedagang Kaki Lima dibagi kedalam tiga kelompok yaitu kurang dari 3 jam, 4-8 jam dan lebih dari 8 jam. Untuk kelompok Pedagang Kaki Lima yang berjualan kurang dari 3 jam biasanya mudah ditemui dikawasan Car FreeDay (CFD) yang berada di lokasi Jalan Boulevard untuk Kecamatan Panakukang, dan Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Ujung Pandang, dan jalan Losari Kecamatan Ujung Pandang.

Pedangang kaki lima yang beroperasi 4-8 jam dapat ditemukan juga di pinggiran jalan startegi kota makassar mereka biasanya memiliki pola pelayanan berpindah dengan menggelar meja atau gerobak, gelaran/ tikar, dan mobil/kendaraan. Mulai biasanya pagi hari sampai siang hari dengan berjualan Makanan Siap Komsumsi khususnya untuk makanan sarapan seperti nasi kuning, bubur ayam, nasi campur, baksi bakar, dan sejenisnya. Bagi pedagang kaki lima yang berjualan lebih 8 (delapan) jam, umumnya mereka memiliki kios atau warung smei permanen mereka berjualan didepan rumah atau menyewa space didepan toko atau ritel moderen.

- **Karakteristik aktifitas PK5 Kecamatan Manggala :**

Kecamatan Manggala memiliki luas 24,14 Kilometer persegi sekitar 13% dari luas Wilayah Kota Makassar, Yang terbagi kedalam 7 wilayah kelurahan. Kelurahan tersebut adalah Antang, Bangkala, Batua, Borong, Manggala dan Tamanggapa. Hasil obesrvasi dilapangan untuk kecamatan Manggala yang terletak di bagian timur kota Makassar memiliki kelompok-kelompok pedagang kaki lima. Di Wilayah Kelurahan Antang tepatnya di jalan raya antang sekitar komp Ruko Antang Business Centre sekitar 1-2 Km akan ditemukan jejeran pedagang kaki lima yang berjualan dan menggelar barang dagangan mereka di kedua sisi jalan tersebut. Aktifitas PK5 disana mulai rama setelah magrib menempati sisi sebelah utara dan selatan jalan. Komoditas barang dagangang mereka berupa Barang dagangan Non Makanan (BNMN) seperti fashion (baju, kemeja dan celana), aksesoris rumah tangga, mainan anak (boneka), kemudian Barang Dagangan Siap Komsumsi (BMSK) seperti bakso, kue-kue, dan aneka cemilan lainnya. Barang berupa Jasa reparasi kursi, service jam tangan, dan tambal ban.

Keluarahan Borong khususnya di jalan borong raya akan mudah dijumpai pedagang kaki lima umumnya mereka berjualan di depan ruko atau batas sempadan jalan. PK5 akan mudah ditemui di sekitar area persekolahan dan mesjid. PK5 disana umumnya tertib dan tidak berbentuk kelompok. Adapun jenis komodotas barang dagangan mereka adalah Brang dgangan non Makassanan seperti pulsa dan paket data internet, asesoris handpone. Kemudian Barang dagangan Siap Komsumsi (BMSK) berupa aneka minuman dan juice, buah-buahan (pisang dan mangga). Ayam goreng dan sari laut. Untuk Jualan Sari laut biasanya berjualan setelah malam hari dengan memanfaatkan ruas badan jalan di depan ruko-ruko yang sudah tidak beroperasi.

- **Karakteristikaktifitas PK5 Kecamatan Panakukang:**

Terbagi kedalam 11 (sebelas) kelurahan meliputi kelurahan karampuang, Karuwisi, Karuwisi Utara, Masale, Pampang, Panaikang, Pandang, Paropo, Sinri Jala, Tamamaung, dan Tello baru. Kecamatan Panakkukang terdiri dari 11 kelurahan dengan luas wilayah 17,05 km². Kecamatan Panakkukang berbatasan dengan Kecamatan Tallo di sebelah utara, Kecamatan Tamalanrea di sebelah timur, Kecamatan Rappocini di sebelah selatan dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Makassar.

Hasil obersvasi dilapangan terhadap aktifitas PK5 di Kecamatan Panakukang dapat di temui di jalan boulevard dan pengayoman. Aktifitas PK5 di Jalan Boulevard sendiri sepanjang jalan tersebut hingga depan Mall Panakukang akan dijumpai beraneka jualan yang mengandalkan Mobil sebagai sarana berjualan. PK5 tersebut menjual Branda dagangan Siap Komsumensi (BMSK) aneka makanan dan minuman seperti nasi kuning, nasi campur, lontong sayur, martabak dan terang bulan, sementara minuman dapat berupa aneka es dan juice. Karakteristik dari PK5 disana adalah untuk kategori BMSK dan tidak ditemukan kategori lainnya seperti Jasa atau non makanan.

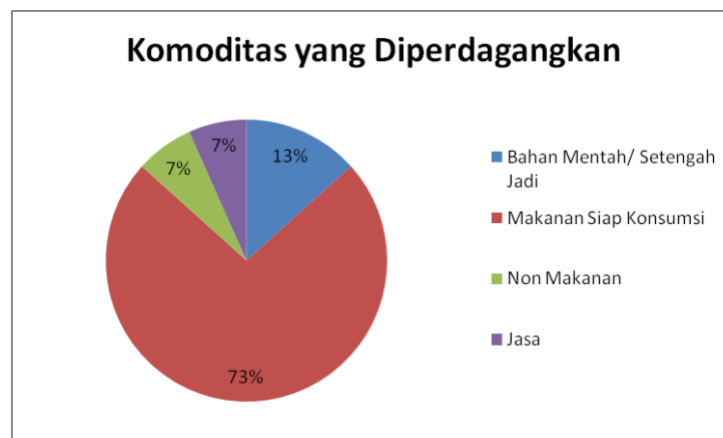
Salah satu program pemerintah adanya Car Freee Day dikawasan jalan Boulevard yang dimulai pada hari minggu jam 6 pagi sampai jam 10 membuat sentra PK5 berkumpul dan berada disana. CFD dimanfaatkan pedagang PK5 yang berdomisili dari luar kecamatan panakukang seperti dari Kecamatan Antang, hingga dari kabupaten Gowa berjualan di kawasan tersebut. PK5 dalam kegaitan CFD biasanya menggunakan mobil atau kendaraan untuk berjualan, selainitu ada meja dan gerobak yang tidak permanen, sisanya mereka menggelar jualan dengan menggunakan tikar atau meja.

Keluarahan lain yang ramai dari aktifitas PK5 adalah panaikang. Aktifitas PK5 kan mudah ditemukan di Jalan perintis kemerdekaan dan jalan Uris Sumihardjo. Sepanjang jalan tersebtu akan mudah kita jumpai PK5 berjualan di kedua ruas sisi jalan yang memenuhi trotoar. Khususnya yang berada di sekitar taman makam panaikang akan kita jumpai PK5 yang berjualan aneka minuman dan manakanan. Jualan mereka berupa es teller, es kepal, juice buah. Sementara untuk makanan umumnya mereka berjualan bakso, nasi campur dan nasi kuning.

Dari hasil wawancara dan survey yang telah dilakukan pada penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a) **Kesulitan bahan baku:** Permasalahan yang dihadapi PK5 dalam mengembangkan usahanya yang sering dikeluhkan saat ini oleh PK5 saat ini adalah kesulitan memperoleh bahan baku karena rata-rata harga bahan dasar untuk produksi seperti telur, daging ayam, dan beberapa bahan pokok dirasakan mengalami kenaikan beberapa bulan ini. Permasalah ini banyak dikeluhkan oleh PK5 yang menjual BMSK (Bahan Makanan Siap Komsumsi) seperti PK5 yang berjualan nasi kuning, nasi campur, dan ayam goreng. Seperti yang dikeluhkan ibu Sri yang berasal dari kecamatan Biringkanaya di jalan poros perumahan hartaco. Selain itu Bapak ilham yang berjualan nasi kuning di jalan poros antang depan pasar.

Kesulitan ini merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan karena berdasarkan survey responden yang disajikan pada gambar 1, sebanyak 73% responden yang merupakan pelaku PK5 menjual barang dagangannya yang berupa makanan siap saji. Oleh karena itu, jika permasalahan sulitnya bahan baku untuk produksi makanan oleh PK5 ini dapat teratasi, maka kesejahteraan PK5 secara umum di kota Makassar dapat ditingkatkan.

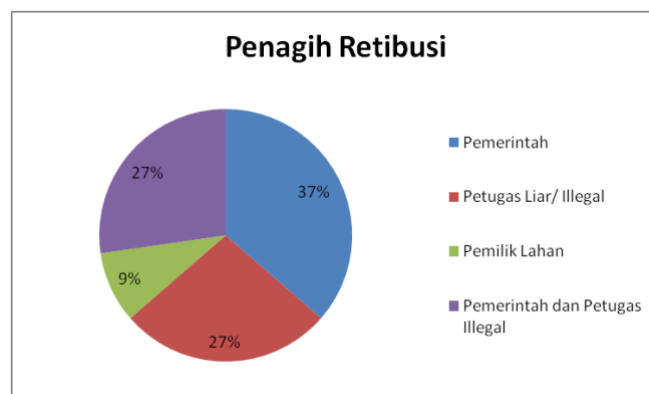


Gambar 4.8. Komoditas yang Diperdagangkan oleh PK5

- b) **Penagihan restribusi yang tidak jelas:** dari hasil wawancara dengan Pedagang Kaki Lima khususnya bagi PK5 yang berjualan disepanjang Jalan Bolevard Kecamatan Panakukang diwajibkan membayar iuran Rp.5.000 s.d 10.000 perhari oleh “oknum” yang mengaku pihak keamanan disana. Pembayaran itu pun tidak jelas dari pihak mana, tetapi bila tidak membayar maka akan diusir dan tidak boleh berjualan ditempat itu. PK5 pada umumnya tidak keberatan membayar semacam

restirbusi asalkan hal tersebut diatur oleh pemerintah dan jelas pemanfaatanya untuk apa. Hal ini dikeluhkan oleh Fikri salah satu pedagang kaki lima yang berada di Jalan Boulevard yang sering ditagih oleh oknum yang menngatas namakan pihak yang bertanggung jawab dilokasi tersebut.

Pembayaran retribusi yang tidak jelas muaranya ini juga menjadi permasalahan umum PK5 Kota Makassar. Berdasarkan Gambar 2 yang disajikan, maka dapat diketahui bahwa sebanyak 27% responden yang merupakan pelaku PK5 membayar tagihan retibusi kepada pemerintah maupun petugas illegal, bahkan jika dikalkulasikan maka sebanyak 54% pelaku PK5 membayar tagihan retribusinya kepada petugas liar/illegal. Hal ini tentu saja akan memberikan rasa tidak aman karena petugas illegal dapat menagih dalam jumlah yang tidak menentu dan uang tagihan pada petugas illegal tentunya tidak memberikan keuntungan untuk kemajuan daerah.

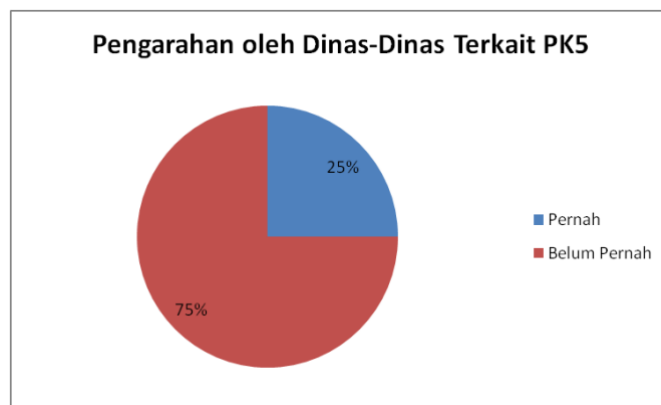


Gambar 4.9. Penagih Retribusi untuk kegiatan PK5

- c) ***Perbanyak event dan kegiatan promosi:*** untuk PK5 yang memiliki karakter BNMN (Barang non Makanan) seperti penjual aksesoris, barnag-barang kerajinan dari sampah, dan barang kesenian. Event dibutuhkan oleh PK5 tersebut sebagai salah satu aktifitas promosi dan penjualan. Seperti yang di utarakan oleh Pak Alif pedagang dan pengrajin lampu hias yang berlokasi di jalan perintis kemerdekaan pintu 2 Unhas. Pak Alif merupakan pengrajin lampu hias dari sampah bekas seperti botol dan plastik. Sistem berjualan di depan ruko yang digelar setiap hari atau berpindah mengikuti kegiatan event-event seperti pameran yang sering diadakan pihak swasta yang membayar. Harapannya pemerintah sering memperbanyak event

yang tidak berbayar sebagai salah satu strategi promosi usaha pengelolaan barang-barang bekas atau sampah yang dijadikan lampu hias.

Adanya event-event dan promosi yang dilakukan oleh pemerintah merupakan salah satu strategi pengarahan oleh dinas-dinas terkait PK5. Berdasarkan hasil survey yang tersaji pada Gambar 3, dapat diketahui bahwa sebagian besar pelaku PK5 yang ada di Kota Makassar belum pernah mendapatkan pengarahan oleh pemerintah. Oleh karena itu, secara umum dapat disimpulkan bahwa pelaku PK5 di Kota Makassar masih memerlukan pengarahan oleh dinas-dinas terkait agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka sebagai PK5.

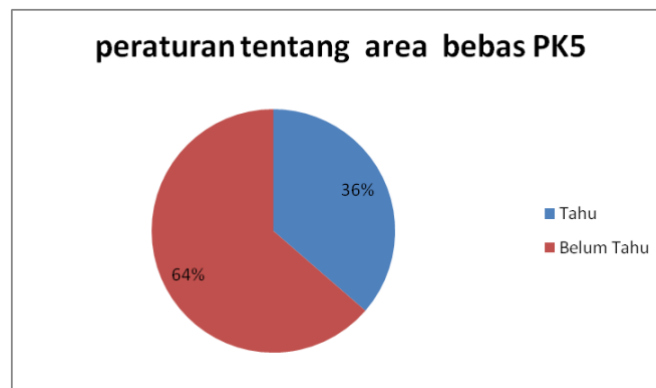


Gambar 4.10. Pengarahan oleh dinas-dinas terkait yang didapat oleh responden

- d) ***Sadar akan ketertiban dan kebersihan:*** PK5 yang ditemui dan diwawancarai pada dasarnya sangat memperhatikan terkait kebersihan dan ketertiban usahanya. Kebersihan berupa tersedianya tempat pembuangan sampah yang kemudian akan di bawa pulang untuk di buang ditempat yang disediakan. Ketertiban berupa penataan gerobak atau barang dagangan yang tidak mengganggu pengguna masyarakat lain. Umum mereka berjualan di depan ruko yang disewa, di pinggir atau badan jalan yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. Mereka berjualan di arena-arena yang dikhususkan bagi PK5 seperti kawasan sentra kuliner seperti di BTP, kawasan CFC (Car Fre Day) di jalan boulevard.

Berdasarkan hasil survey yang tersaji pada Gambar 4, sebanyak 64% responden pelaku PK5 belum mengetahui tentang adanya area/ kawasan yang tidak boleh digunakan untuk kegiatan PK5. Meskipun demikian, secara umum para pelaku PK5

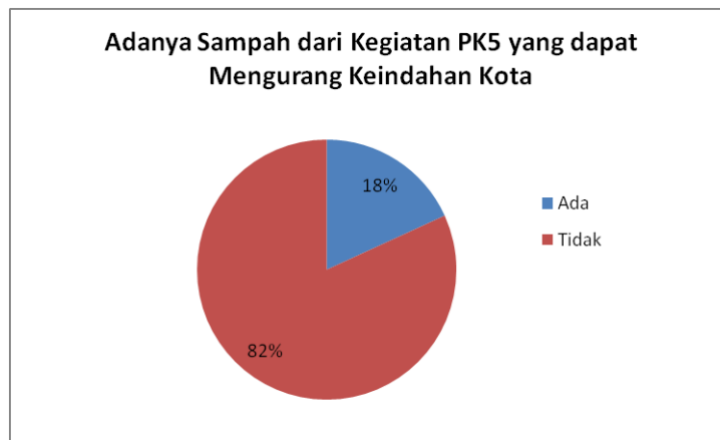
Kota Makassar memiliki kesadaran terhadap ketertiban dan kebersihan, hal ini dapat dilihat pada hasil penelitian: Gambar 5 yang menunjukkan bahwa dari aktivitas PK5 yang dilakukan 92% tidak menimbulkan kemacetan, Gambar 6 menunjukkan bahwa 82% aktivitas PK5 ini tidak menimbulkan sampah. Adapun Penanganan sampah yang banyak dilakukan oleh PK5 adalah dengan cara mengumpulkan sampah dalam tempat sampah dan berlangganan dengan petugas kebersihan, hal ini dapat dilihat pada hasil penelitian yang tersaji pada Gambar 7. Bahkan sebanyak 13% responden memanfaatkan sampah yang dihasilkan untuk kerajinan sehingga lebih bermanfaat, sehingga dapat diketahui bahwa PK5 memiliki kesadaran yang cukup tinggi terhadap ketertiban dan kebersihan.



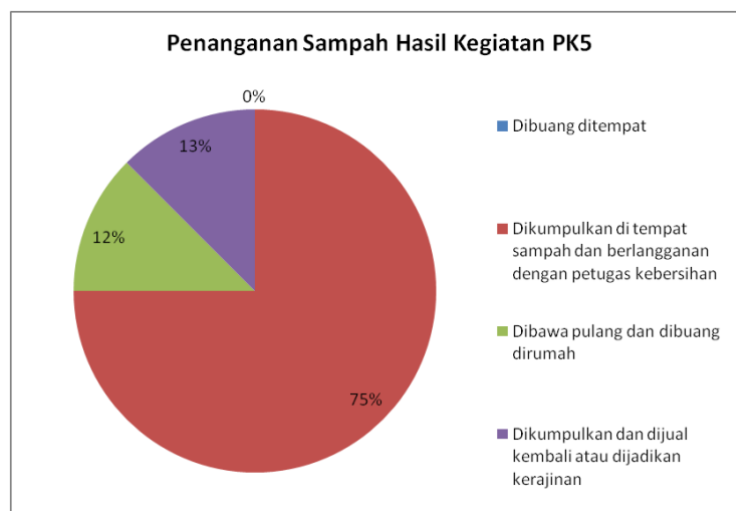
Gambar 4.11. Pengetahuan PK5 tentang Peraturan terkait Area Bebas PK5



Gambar 4.12. Adanya Timbulan Kemacetan Akibat Aktivitas PK5

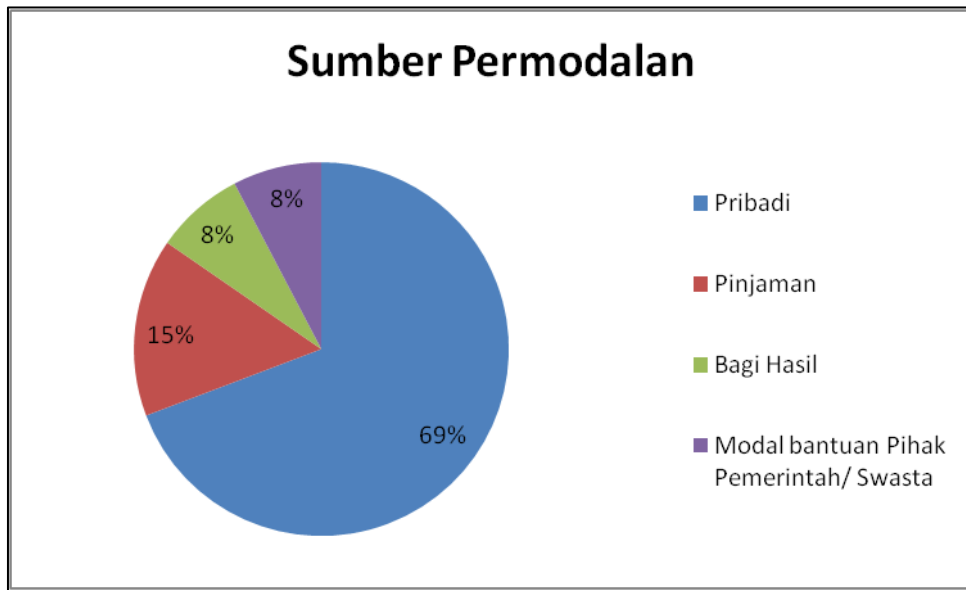


Gambar 4.13. Timbulnya Sampah Akibat aktivitas PK5



Gambar 4.14. Penanganan Sampah Hasil Kegiatan PK5

- e) **Permodalan** : aspek permodalan bagi PK5 pada umumnya mereka peroleh dari modal sendiri atau meminjam dari pihak keluarga, hal ini didukung dari hasil penelitian yang tersaji pada Gambar 8, yakni jika ditotal maka sebanyak 77% responden mendapatkan modal dari pribadi dan pinjaman. Mereka tidak mengandalkan permodalan dari pihak ketiga atau lembaga keuangan karena menurut akan menyusahkan. Hampir tidak ada yang mengeluh terhadap aspek permodalan, karena umumnya penggunaan modal awal yang mereka dapatkan sudah dapat diputar untuk menunjang keperluan usaha sehari-hari.



Gambar 4.15. Sumber Permodalan PK5

- f) **Relokasi dan desentralisasi** : pada umumnya PK5 yang diwawacarai dan pada saat FGD tidak keberatan bila mendapat relokasi usaha nya. Faktor terpenting adalah tempat tersebut ramai dan mudah dijangkau oleh konsumen. Tidak mengeluarkan biaya yang besar seperti keharusan membayar uang restribusi yang besar. Faktor lainnya adalah tempat tersebut terdapat sarana prasarana misalnya penunjang kebersihan, dan keperluan lainnya seperti fasiltias umum (toilet, air dan listrik). Pak alif misalnya yang berdagang dikawasan GOR sudiang setiap minggu yang dimana pola pengaturan PK5 disana diatur oleh pihak pengelola, dan kewajiban restibusi yang ada, namun hal tersebut sebanding dengan pemasukan yang diterimanya.

Kesediaan pelaku PK5 untuk direlokasi ternyata belum diimbangi dengan adanya tempat relokasi yang disediakan oleh pemerintah pasca penggusuran atau penertiban yang dilakukan guna mengembalikan tata ruang kota sesuai peruntukaannya. Pada Gambar 9 dapat dilihat bahwa hanya sekitar 5% responden yang pernah mengalami penertiban mendapatkan tempat baru untu mereka jualan. Oleh karena itu, ketersediaan tempat relokasi PK5 merupakan salah satu faktor penting yang dibutuhkan untuk pembangunan daerah Kota Makassar



Gambar 4.16. Ketersediaan Tempat Relokasi Pasca Penggusura

4. 4 Analisis SWOT

Analisis SWOT dilakukan untuk mengidentifikasi factor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap pengelolaan dan penataan pedagang kaki lima agar tata kota tetap terjaga tanpa menghilangkan sumber perekonomian masyarakat. Identifikasi dan analisis terhadap kelebihan, kelemahan, ancaman maupun peluang pedagang kaki lima diuraikan pada table 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2 Analisis SWOT

Faktor Internal	Strengths (S)	Weakness (W)
	<ul style="list-style-type: none"> - Biaya operasional murah - Harga kompetitif - Lokasi umumnya strategis 	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan & Keterampilan terbatas - Modal kecil - Persaingan tidak sehat - Kualitas produk tidak terjamin - Pemasaran sangat konvensional - Area parkir terbatas - Semrawut - Kurang memanfaatkan teknologi
Faktor Eksternal		
Opportunity (O) <ul style="list-style-type: none"> - Perhatian pemerintah terhadap sector informal semakin baik - Peningkatan daya beli masyarakat 	Strategi S-O <ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan pemerintah terhadap pelaku pedagang kaki 5 agar dapat menjalankan roda usahanya dengan efisien dan efektif guna mempertahankan keunggulannya dalam hal harga dan biaya operasional - Mengumpulkan data dan informasi terkait perilaku konsumen pedagang kaki lima 	Strategi W-O <ul style="list-style-type: none"> - Mendorong pengembangan kelembagaan pedagang kaki lima untuk memudahkan akses permodalan, peningkatan daya kompetisi, perbaikan kualitas produk, serta pemasaran - Mengadakan diskusi terjadwal yang dibina oleh pihak pemerintah kota guna mempelajari arah

	guna mengoptimalkan pangsa pasarnya	perkembangan keutuhan produk dan perilaku konsumen - Perbaikan sarana dan prasarana fisik area pedagang kaki lima
Threats (T) - Perilaku konsumen berubah dari belanja konvensional ke belanja online - Pungutan liar - Ketidaksesuaian peruntukan lokasi (tata ruang)	Strategi T-S - Membina dan melatih pelaku pedagang kaki lima agar mampu beradaptasi dengan perilaku konsumen yang terus berubah dari waktu ke waktu - Membuat aturan/regulasi serta mensosialisasikannya ke seluruh pelaku PK5, termasuk hak-hak dan kewajibannya - Mengatur peruntukan kawasan PK5, termasuk tata ruang dan tata bangunan serta jangka waktu yang diperbolehkan. - Melakukan evaluasi berkala terhadap keberadaan dan kepatuhan pelaku PK5 terhadap berbagai aturan, sekaligus melakukan pembinaan	Strategi T-W - Kelompok-kelompok yang dibentuk perlu dibina secara berkesinambungan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya guna mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi

Berdasarkan uraian strategi sebagaimana dijelaskan pada tabel di atas, tampak bahwa permasalahan dan strategi yang diperlukan terutama berhubungan dengan peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam rangka menghadapi situasi yang terus berubah, termasuk tuntutan perkembangan kota. Oleh karena itu dalam melakukan pembinaan PK5, pemerintah kota perlu memiliki data base dan road map pengembangan pelaku PK5. Pelaku-pelaku PK5 tersebut perlu memiliki milestone dan tahapan pengembangan sehingga pada level ekonomi tertentu mereka dapat keluar dari kelompok PK5. Dengan kata lain, pelaku PK5 ini dapat dianggap sebagai start up sector informal yang perlu dibina dan dikembangkan lebih lanjut menjadi sektor usaha yang lebih mandiri yang pada akhirnya masuk ke dalam sektor formal sebagai pelaku usaha.

4.5 Strategi Penataan dan Pemberdayaan PK5 di Kota Makassar

Sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu memperoleh strategi penataan dan pemberdayaan PK5 di Kota Makassar sehingga peneliti membatasi pembahasan hanya sampai pada strategi. Peneliti tidak membahas mendalam sampai dengan teknis pelaksanaan., karena untuk keperluan tersebut penulis menganggap masih perlu adanya penelitian lanjutan.

Strategi prioritas dalam penelitian ini berdasarkan pada hasil analisis para anggota tim ahli, dimana untuk masing-masing strategi dilakukan secara kualitatif oleh peneliti atas dasar hasil analisis SWOT yang bersumber dari hasil kuisioner/FGD/ dan wawancara dengan pelaku PK5

Hasil analisis tersebut menghasilkan lima Strategi prioritas dan tiga strategi alternatif. Strategi Prioritas, terdiri dari: (1) Registrasi dan pembuatan database PK5; (2) Pemberdayaan ekonomi pelaku PK5; (3) Penataan lokasi PK5; (4) Menyatukan persepsi dalam pengelolaan PK5; (5) Pengendalian dan pengawasan berkesinambungan dan terpadu. Sedangkan strategi alternatif terdiri dari: (1) Penundaan penggusuran & dialog dengan pemda; (2) Pembatasan jumlah pedagang dalam satu lokasi; (3) Mensyaratkan setiap pengelola gedung/pabrik/kompleks perumahan untuk menyediakan lokasi tertentu bagi PK5

Mengingat bahwa masing-masing strategi ini merupakan seperangkat formulasi yang komprehensif, sehingga dalam implementasinya strategi-strategi ini tidak dilakukan satu persatu atau tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus bersamaan agar dapat memperoleh hasil yang optimal. Untuk lebih jelasnya di bawah ini diuraikan masing-masing strategi tersebut

Strategi Prioritas

1. Strategi registrasi dan pembuatan database PK5.

Strategi ini layak mendapatkan prioritas utama karena registrasi dan database yang ada saat ini belum seperti yang diharapkan. Keberadaan PK5 harusnya terdata secara kontinu dan ada pada masing-masing wilayah, namun data pasti dari jumlah PK5 masih belum bisa didapatkan di Kota Makassar. Untuk dapat menata dan memberdayakan PK5 diperlukan data dasar yang valid yang merupakan hasil survei komprehensif dan selalu di-update setiap tahun.

Strategi ini dapat dilakukan dengan beberapa program sebagai berikut :

1. Sosialisasi syarat-syarat registrasi.
2. Melakukan sistem jemput bola dengan mendatangi PK5 untuk melakukan registrasi agar mendapatkan ijin sebagai PK5 sambil melakukan survei PK5 secara komprehensif.

3. PK5 yang sudah diregistrasi diwajibkan memasang foto dan Surat Ijin Usaha di tempat usahanya. Bila tidak, maka dianggap sebagai PK5 ilegal.
4. Membuat hardcopy dan softcopy hasil survei PK5. Untuk selanjutnya dilakukan update per tahun untuk mendapatkan data yang valid mengenai jumlah PK5, khususnya PK5 yang masuk dan keluar.
5. Registrasi PK5 juga perlu memasukkan mereka sebagai wajib pajak melalui pembuatan NPWP

Hasil yang diharapkan dari strategi ini adalah didapatkan data PK5 yang *up to date* sehingga pergerakan PK5 selalu dapat diamati dan dikontrol. Dengan memasukkan mereka sebagai wajib pajak, PK5 akan mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan kota Makassar. Dari sisi kebijakan, pengambil kebijakan harus jelas mengenai sub-group dalam sektor informal untuk mendesain kebijakan yang tepat.

2. Strategi pemberdayaan ekonomi pelaku PK5.

Dengan adanya database PK5 maka dapat disusun strategi pemberdayaan ekonomi PK5, dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada pelaku PK5 terkait masalah usaha seperti pelatihan pembukuan, manajemen, pasar, dan investasi. PK5 lemah dalam hal pembukuan sehingga diperlukan pelatihan pembukuan agar akuntansi keuangan usahanya lebih baik. Umumnya PK5 menghadapi masalah pasar dan investasi sehingga diperlukan pelatihan pemasaran dan investasi. PK5 juga menjalankan usaha secara temporer tanpa sistem manajemen berkelanjutan sehingga diperlukan pelatihan manajemen usaha. Selain itu, mayoritas PK5 lemah dalam konsep marketing atau nilai tambah produk sehingga diperlukan pelatihan pemasaran dan nilai tambah produk.

Hasil yang diharapkan dari strategi ini adalah pelaku PK5 yang sudah teregistrasi semakin kuat dari sisi kewirausahaan sehingga mereka mampu menjalankan usahanya secara lebih efektif dan efisien. Melalui pemberdayaan ekonomi, ada harapan bahwa dengan berkembangnya usaha, pelaku PK5 akan bertransformasi dari informal menjadi formal, misalnya mereka mampu menyewa kios resmi di dinas-dinas pasar. Transformasi struktur informal menjadi formal dapat dilakukan dengan memfasilitasi integrasi usaha dengan pasar.

3. Penataan lokasi PK5

Strategi ini dicapai dengan penetapan kawasan-kawasan khusus yang diperbolehkan untuk aktivitas PK5. Berdasarkan Keputusan Walikota Makassar No.44 Tahun 2002 tentang Penunjukan beberapa Tempat Pelataran yang Dapat dan Tidak Dapat Dipergunakan Oleh PK5 dalam Wilayah Kota Makassar.

Penetapan lokasi tersebut perlu ditindak lanjuti dengan penataan ruang dan infrastrukturnya. Disamping itu perlu di bentuk suatu entitas sendiri yang dapat mengelola masing-masing lokasi tersebut dan dapat mereduksi penambahan PK5 yang terus menerus (Over capacity). Hal sama untuk lokasi-lokasi yang tidak termasuk dalam Keputusan Walikota di atas, namun di bawah kapasitas, dan masih bisa ditolerir keberadaan PK5 perlu dilakukan penataan ruang dan infrastrukturnya.

Sedangkan untuk lokasi yang sudah tidak bisa ditolelir lagi maka tidak ada jalan lain harus di relokasi , apakah ketempat yang sudah ada atau ke tempat yang baru. Strategi ini akan terlaksana dengan baik apabila pemda sudah punya data PK5 serta melakukan dialog yang intensif.

Salah satu strategi penataan lokasi PK5 yang bisa diaplikasikan di Kota Makassar adalah dengan pembangunan pasar sentra kaki lima seperti yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar sebelumnya, yaitu adanya pembangunan *Kanre Rong ri Karebosi*. Pembangunan pasar sentra kaki lima ini dihadapkan pada kendala terbatasnya alokasi lahan untuk PK5 di kota Makassar. salah satu lokasi yang direkomendasikan adalah di daerah waduk Tamangapa karena daerah ini selalu ramai pengunjung dan dijadikan tempat berkumpulnya PK5. Kawasan waduk tamangapa sangat potensial untuk dijadikan sebagaik kawasan pk5 centre karena lokasi ini memiliki panorama yang cukup indah sehingga bisa menarik minat pengunjung, selain itu lokasi Waduk Tamangapa mudah dijangkau oleh masyarakat. Adapun model kawasan lokasi pk5 center yang dapat diaplikasikan di lokasi ini bisa berupa PK5 terapung dengan memanfaatkan ruang diatas waduk. Gambaran umum untuk PK5 terapung dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4.17 : Waduk Antang-Tamangapa yang dapat dijadikan lokasi PK5 Center



Gambar 4.17 Model Kawasan PK5 senter yang dapat diaplikasikan

4. Menyatukan persepsi dalam pengelolaan PK5.

Prioritas strategi berikutnya adalah menyatukan persepsi dalam pengelolaan PK5. Strategi ini menjadi prioritas mengingat banyaknya stakeholder yang berhubungan langsung dengan penataan dan pemberdayaan PK5. Para stakeholder harus duduk bersama dengan pelaku PK5 (atau wakilnya) sehingga ditemukan kesamaan persepsi dalam mengelola PK5. Kerjasama dapat dilakukan antar stakeholder termasuk Pemkot, LSM, universitas, komunitas PK5 dan pemimpin lokal. Pemerintah dan semua stakeholder yang

relevan harus berusaha menurunkan pengangguran dengan memberikan dukungan keberadaan sektor informal.

Dalam penyatuan persepsi terhadap penataan dan pemberdayaan PK5, perlu dipikirkan langkah yang lebih berani. Penataan kelembagaan dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu: (1) menyederhanakan dan mengkonsolidasikan badan atau institusi yang mengurus kegiatan fasilitasi PK5, (2) membentuk komite yang berfungsi sebagai think tank untuk tugas-tugas policy formulation, yang wewenang keputusan akhirnya berada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan (3) membuat peraturan daerah PK5 yang khusus menangani sektor informal di level lokal.

Salah satu upayayang dapat dilakukan untuk mempermudah terwujudnya strategi penyatuan persepsi dalam pengelolaan PK5 ini adalah dengan cara memperkuat kelembagaan PK5. Pemerintah kota perlu memperkuat kelembagaan PK5 yang berfungsi bukan hanya mewakili kepentingan PK5 tetapi juga menjadi mitra kerja pemerintah kota dalam mengelola dan mengontrol PK5. Dengan demikian asosiasi ini seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman yang memperkuat posisi PK5 tetapi sebagai partner dalam penataan dan pemberdayaan PK5. Asosiasi PK5 akan lebih baik bila sifatnya lokasional, bukan menurut tipologi barang dagangan karena mereka akan dapat mewakili dan mengontrol setiap lokasi PK5.

Strategi ini diharapkan menghasilkan upaya yang lebih fokus dalam penataan dan pemberdayaan PK5, menghindari pemborosan dana dan duplikasi program. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi lebih difungsikan sebagai pelaksana kebijakan dengan fokus pada penataan dan pemberdayaan PK5.

5. Pengendalian dan pengawasan berkesinambungan dan terpadu.

Konsistensi dalam pengendalian dan pengawasan terhadap aktivitas PK5 diperlukan agar aktivitas tersebut dapat tepantau. Upaya ini dapat dilakukan apabila ada keseriusan dari pihak-pihak terkait dalam mengelola PK5 sehingga tidak menjadikannya sebagai komoditas untuk kepentingan politis praktis dan pungutan liar. Harus ada kejelasan tugas dan wewenang setiap stakeholder dalam mengawasi PK5 sehingga tidak ada tumpang-tindih dalam pelaksanaannya.

4.4 Alternatif Strategi Lainnya

Selain strategi yang telah diuraikan di atas, terdapat strategi-strategi lain sebagai alternatif, yaitu :

1. Penundaan penggusuran & dialog dengan Pemda.

Strategi ini perlu dilakukan agar dapat menurunkan angka pengangguran dan menciptakan lapangan kerja yang mencukupi. Penggusuran dan kekerasan dalam pengelolaan PK5, tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan menciptakan pengangguran-pengangguran baru karena hilangnya pekerjaan di sektor formal. Sektor informal hendaknya tidak dihilangkan (melalui penggusuran atau penertiban), tetapi perlahan-lahan memformalkannya. PK5 kembali ke lokasi yang sama beberapa saat setelah penggusuran dan penertiban. Ini menunjukkan bahwa penggusuran hanya efektif sementara waktu, namun tidak efektif jika digunakan sebagai program jangka panjang. Kebijakan jangka pendek bukanlah penyelesaian permanen untuk ekonomi informal. Semua hasil penelitian tersebut menjustifikasi perlunya penundaan penggusuran dan dialog antara Pemerintah Kota dan PK5.

Melalui dialog diharapkan tercipta penyelesaian yang memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Penyelesaian ini akan dapat mengakomodasi kepentingan Pemerintah Kota Makassar dan kepentingan PK5. Konsensus yang dicapai harus dihormati bersama dan secara konsekuen dijalankan sehingga tidak ada lagi pihak-pihak yang merasa dirugikan.

2. Pembatasan jumlah pedagang dalam satu lokasi.

PK5 merupakan aktivitas yang dapat mengurangi pengangguran dan terbatasnya lapangan kerja di sektor formal. Akan tetapi jika pertumbuhannya melebihi daya tampung kota, akan berdampak buruk juga bagi perkembangan perkotaan. Besaran ekonomi informal di sebagian besar negara transisi dan OECD cenderung meningkat selama dekade terakhir. Sektor informal cukup besar dan tumbuh sepertiga dari besaran ekonomi formal.

Pertumbuhan sektor informal, khususnya PK5, perlu dicermati dan dikontrol. Kontribusi positif sektor informal mempunyai batas tertentu. Jika batas itu sudah terlewati maka kontribusinya akan menurun. Penempatan PK5 di pedestrian tidak sesuai dengan konsep place for people dan PK5 yang beroperasi di ruang publik tidak mendukung dan memotivasi pembangunan lanskap urban yang berimbang dalam hal elemen alami

lingkungan urban. Kontrol ekonomi informal, terlebih dahulu harus dibangun kebijakan yang mengarah kepada penurunan minimum yang dapat diterima. volume ekonomi informal sampai pada level minimum yang dapat diterima.

Strategi pembatasan jumlah PK5 dalam satu lokasi dapat dikaitkan dengan strategi prioritas pertama yaitu registrasi dan pembuatan database PK5. Tersedianya database PK5 pada lokasi tertentu membuat jumlah PK5 dapat dikelola dan dipantau. Selain itu, perlu dilakukan kajian tentang daya tampung suatu lokasi sehingga jumlah PK5 tidak melebihi ambang batas yang berdampak negatif bagi perkembangan perkotaan. Registrasi tidak akan dikeluarkan lagi jika jumlah PK5 sudah melebihi ambang batas yang ditetapkan.

Hasil yang diharapkan dari strategi ini adalah pemerintah kota akan mendapatkan kontribusi positif dari keberadaan PK5, untuk Pendapatan Asli Daerah. Di sisi lain, dampak negatif seperti kemacetan, kekumuhan, dan kesremawutan dapat dihindari. PK5 akan lebih nyaman berusaha, kompetisi berlebihan tidak terjadi, dan tingkat profit dapat terjaga.

3. Mensyaratkan setiap pengelola gedung/pabrik/kompleks perumahan untuk menyediakan lokasi tertentu bagi PK5.

Pemkot dapat memberikansyarat untuk setiap pengelola gedung/ruko memberikan ruang bagi PK5. Alternatif strategi ini akan memberikan tiga keuntungan, yaitu: PK5 tetap dapat menjalankan usaha, ruang publik yang digunakan PK5 akan berkurang, dan masalah utama kemacetan dapat diturunkan.

Strategi ini diperlukan bukan saja untuk menampung konsumen dari luar, tetapi terutama adalah untuk menampung kebutuhan atau permintaan dari pegawai atau penduduk dari lokasi itu sendiri. Sebagai contoh di depan alfamidi/indomaret/alfamart harus menyediakan tempat dan bekerjasama dengan PK5 (misalnya penjual makanan), sehingga konsumen dapat berbelanja dengan beberapa keperluan sekaligus (termasuk belanja dengan PK5), dan jumlah PK5 yang berjualan dekat dengan badan jalan juga dapat diminimalisasi. Dengan demikian terjadi simbiosis mutualisme antara sektor informal (PK5) dengan sektor formal.

Apapun strategi yang dipilih oleh Pemerintah Kota Makassar dalam menata dan memberdayakan PK5, harus ada persepsi pada pemerintah kota bahwa PK5 dapat

berkontribusi signifikan dan positif dalam pembangunan kota Makassar apabila mampu ditata dan diberdayakan secara manusia.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Secara garis besar pola penyebaran PK5 Kota Makassar ada dua jenis, yaitu: pola penyebaran PK5 memanjang (linier agglomeration) dan pola penyebaran PK5 secara mengelompok (*focus agglomeration*). Pola penyebaran PK5 memanjang, antara lain terdapat di jalan Perintis, jalan hertasning, dan jalan antang raya, jalan Perumnas Antang raya dan BTP.
2. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan tata kota Makassar agar menjadi kota yang lebih tertib dan indah terkait adanya PK5, antara lain: Penataan lokasi PK5 melalui pembentukan pasar sentra PK5 dan Pengendalian dan pengawasan PK5 secara berkesinambungan dan terpadu
3. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah kota untuk mempertahankan keberadaan PK5 Kota Makassar agar tidak menghilangkan mata pencaharian masyarakat, antara lain dengan membuat data base dan road map pengembangan pelaku PK5 sehingga memiliki tahapan pengembangan dan pada level ekonomi tertentu mereka dapat keluar dari kelompok PK5 (dari sektor informal menjadi sektor formal).

5.2 Rekomendasi

Peneliti mengusulkan sebanyak 8 rekomendasi strategi yang dapat dijadikan rujukan oleh pemerintah kota Makassar dalam pengelolaan PK5 di kota Makassar. Terdapat lima Strategi prioritas dan tiga strategi alternatif yang direkomendasikan oleh peneliti. Strategi Prioritas, terdiri dari: (1) Registrasi dan pembuatan database PK5; (2) Pemberdayaan ekonomi pelaku PK5; (3) Penataan lokasi PK5; (4) Menyatukan persepsi dalam pengelolaan PK5; (5) Pengendalian dan pengawasan berkesinambungan dan terpadu. Sedangkan strategi alternatif terdiri dari: (1) Penundaan penggusuran & dialog dengan pemda; (2) Pembatasan jumlah pedagang dalam satu lokasi; (3) Mensyaratkan setiap pengelola gedung/pabrik/kompleks perumahan untuk menyediakan lokasi tertentu bagi PK5.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiharjo, E. 1999. *Kota Berkelanjutan*. Bandung: Penerbit Alumni. Hlm. 201-216
- Tiasnaadmidjaja, DA. 1997. *Pembangunan Pranata*. Bandung: Universitas Parahiayang 1997. hlm. 6.
- Dewanto. 2004. *Potret Kehidupan Pedagang Kaki Limadi Pantai Losari*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Harisah A. *Proses Terbentuknya Teritori PK5 di Makassar*. Prosiding Temu Ilmiah IPLBI
- Harisah A. dan Arima T. 2012. *Diversity Concept of the Traditional Markets and Surroundings in Suburban Makassar*. AURG, China.
- Heriyanto, Aji Wahyu. 2012. *Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Simpang Lima dan Jalan Pahlawan Kota Semarang*. Economics Development Analysis Journal: 1 (2)
- Ismawan. 2002. *Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Perpres RI No. 125 Tahun 2012 tentang *koordinasi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima*.
- Prasetyo, PE. 2003. *Model Keputusan Pemilihan Lokasi Usaha*. Jurnal Sains dan Teknologi Sinergi. Yogyakarta: Pusat Penelitian Universitas PGRI.
- Riskasari, dan Thahir MM. 2017. *Penertiban Pedagang Kaki Lima (PK5) Menuju Makassar Kota Dunia*. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
- Saroso, W. 2011. *Mengetengahkan yang Terpinggirkan: Ekonomi Informal Perkotaan dalam Bunga Rampai Pembangunan Kota Indonesia dalam Abad 21, Konsep dan Pendekatan Pembangunan Perkotaan di Indonesia*. Yayasan Sugijanto Soegijokodan Urban and Regional Development Institute, Jakarta, p.228-247.
- Setiawan, N. 2007. *Penentuan Ukuran Sampel Memakai Rumus Slovin dan Tabel Krejcie-Morgan : Telaah Konsep dan Aplikasinya*. Bandung : Unpad Press.
- Susilo, Agus. 2011. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pedagang Menempati Bahu Jalan di Kota Bogor (Studi Kasus Pedagang Sembako di Jalan Dewi Sartika Utara)*. Tesis. Fakultas Ekonomi Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik. Jakarta: Universitas Indonesia